# HASIL MUSYAWARAH BESAR III
# LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM

# (LEMKARI)

JAKARTA 28/D 4 MEI 1986

# HASIL MUSYAWARAH BESAR III
# LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM

# (LEMKARI)

JAKARTA 2 S/D 4 MEI 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

# SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMBUKAAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( LEMKARI ) PADA TANGGAL 2 MEI 1986.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Yth. Bapak Menteri Agama ;*
*Yth. Bapak Ketua DPP Golkar atau yang mewakili ;*
*Yth. Bapak Pimpinan Direktorium Pusat Lembaga Karyawan Dakwah Islam ;*
*Yth. Bapak, Ibu Anggota Fraksi Karya DPR RI ;*
*Yth. Bapak, Ibu Anggota Fraksi Karya DPRD DKI ;*
*Yth. Hadirin Undang sekalian.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhana Wataala kita bersama-sama pada malam ini dengan taufiq dan hidayah-Nya telah berkumpul untuk mengikuti Acara Pembukaan Musyawarah Besar Direktorium Pusat Lembaga Karyawan Dakwah Islam ke--III.

Sebagaimana layaknya tugas organisasi selain melaksanakan kegiatan program kerjanya juga tugas melaksanakan konsolidasi. Demikian halnya Mubes Ke-III Direktorium Pusat LEMKARI ini adalah merupakan penjelmaan aspirasi dari anggotanya untuk memilih pimpinan barunya setelah melalui evaluasi dengan mempelajari perjalanan organisasnya dan secara sadar dapat menimba pengalaman yang lalu kemudian berupaya membangun wawasan

kehidupan serta membuka cakrawala kedepan untuk mewujudkan tujuan hakiki dari LEMKARI.

Dengan dilandasi oleh pemikiran tersebut, maka Pimpinan baru yang akan dipilih harus dapat meyakinkan diri akan keberhasilan dari perjuangan yang sudah ditempuh dan masa depan yang akan diraih. Melalui Mubes Ke-III Direktorium Pusat LEMKARI ini tentunya juga akan melahirkan program kerja yang sesuai dengan tujuan utamanya. Sehingga program kerja sedemikian adalah merupakan penjelmaan dari aspirasi keseluruhan anggotanya dan selaras dengan pembangunan negara yang sedang berlangsung.

Sungguh merupakan moment yang strategis pada saat bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan dan berjuang untuk melestarikan serta menghadapi Pemilu 1987. Direktorium Pusat LEMKARI melaksanakan tugas konsolidasinya yang ke-III. Senantiasa hal demikian adalah merupakan kebulatan tekad bagi LEMKARI untuk ikut menjamin kesinambungan pembangunan dan di Era Orde Baru ini melalui prasyarat Pemenangan Pemilu 1987. Dalam menghadapi Pemilu 1987 yang merupakan moment politik yang strategis Lembaga Karyawan Dakwah Islam sebagai Keluarga Besar Golongan Karya melalui kegiatan ikut menjamin perwujudan dari keberhasilan perjuangan mensukseskan Orde Baru.

*Saudara-saudara sekalian ;*

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami merasa ikut berkewajiban untuk memberikan bekal seperlunya, khususnya di Daerah Khusus Ibukota dengan segala situasi dan kondisi yang dihadapi dalam rangka mensukseskan Pemilu 1987 baik penyelenggaraan maupun hasil-hasilnya maka ketertiban dan keamanan merupakan faktor penentu keberhasilan tujuan tersebut.

Kedudukan Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara membawa beban Nasional dan Internasional, dan sebagai barometer serta cermin pelaksanaan Demokrasi Pancasila baik bagi daerah daerah maupun Luar Negeri dalam rangka perjuangan Orde Baru.
Kedudukan Jakarta juga sebagai tempat penyelenggaraan SU—



MPR 1988 dituntut segi pengamanan baik oleh aparat Pemerintah/keamanan maupun partisipasi masyarakat Jakarta untuk dapat berlangsung dengan aman tertib dan sukses hasil-hasilnya.

Memperhatikan kedudukan Jakarta tersebut, maka yang menjadi perhatian khusus adalah pengamanan Daerah Ibukota terjamin dari hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan yang timbul dan secara dini dapat diatasi.

Periode 1986—1987 merupakan titik sentral kegiatan politik dalam melaksanakan Pemilu 1987, hal demikian diperkirakan akan dapat dimanfaatkan oleh kelompok ektrim dengan kegiatan yang terselubung dan cenderung untuk membuat kekacauan.

Berkait dengan hal tersebut diatas, maka kewaspadaan kita terhadap gerakan yang bersifat tertutup dengan penampilan low-profil yang menyulitkan untuk dideteksi dan dimonitor membutuhkan kepekaan dalam membaca kondisi tersebut secara tanggap segera diatasi.
Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua Organisasi Kemasyarakatan Sosial Politik dan Kemasyarakatan, nampaknya hal ini tidak mengurangi Kelompok ekstrim dan diperkirakan akan mengisyukan bahwa asas Pancasila adalah usaha Pemerintah untuk menghapuskan asas agama hal ini akan dapat mempengaruhi opini masyarakat dan mendiskreditkan Pemerintah Orde Baru.

Organisasi terlarang Komunis tak kalah pentingnya sebagai paham yang bersifat Internasional meskipun sudah dilarang di Indonesia tetapi bantuan moriil dan materiil dan ajaran Komunis untuk mempertahankan eksistensinya hal ini mengakibatkan kader Komunis di Indonesia tetap bergerak secara illegal, dengan demikian membutuhkan Kewaspadaan Nasional yang memadai.

Mewaspadai mereka tidak berarti mereka kita isolir tetapi harus kita ajak bicara, diberikan penjelasan mengenai kemajuan pembangunan, tentang Ideologi Pancasila dan lain-lain yang sifatnya adalah untuk kepentingan Negara bangsa Indonesia.

Demikian tadi adalah sekilas gambaran kewaspadaan terhadap

bahaya ekstrim yang dapat menggagalkan perjuangan kita bersama dalam mensukseskan Pemilu 1987.

*Saudara-saudara sekalian ;*

LEMKARI sebagai suatu Lembaga Karyawan Dakwah Islam sesuai dengan namanya tentunya mempunyai missi yang potensial dan dituntut keterlibatannya ikut menyampaikan segala informasi mengenai kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kita ketahui bahwa penduduk di Indonesia adalah mayoritas beragama Islam berarti misi yang diemban oleh LEMKARI melalui kegiatan Dakwah benar-benar dapat menyalurkan aspirasi pemerintah dan mengajak Ummat Islam untuk secara aktif, kreatif dan komunikatif bersama-sama melaksanakan tugas pembangunan ini.

Melalui Mubes III Direktorium Pusat LEMKARI tentunya akan dapat merumuskan program Kerjanya, dan himbauan saya agar program kerja LEMKARI betul-betul selaras Konsepsional dan programatis serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung sehingga akan mencerminkan keterpaduan loyalitas terhadap kebijaksanaan Kepemimpinan Nasional dan dukungan terhadap Orde Baru ini.

Melalui Mubes III Direktorium Pusat LEMKARI kiranya sekaligus mampu merapatkan barisan dan membulatkan tekad memenangkan Pemilu 1987 dengan memberikan hak pilih kita melalui kekuatan sosial politik Golongan Karya sebagai kekuatan utama dari Orde Baru.

Melalui forum Konsolidasi ini kita yakinkan diri kita akan perjuangan kesinambungan Pembangunan disegala bidang sekaligus kesinambungan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan asas Pemilu LUBER, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, tetapi LUBER untuk Golongan Karya adalah "LUBANGI BERINGIN" untuk kemenangan Golkar pada Pemilu 1987.

Demikian pengarahan singkat ini, semoga Allah Subhana



Wataala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mensukseskan Pemilu 1987 dan tanggung jawab Pembangunan lainnya, untuk bangsa dan Negara Indonesia.

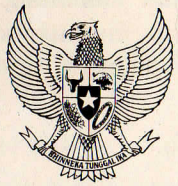
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 2 Mei 1986.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

**R. SOEPRAPTO.**



PENGARAHAN MENTERI AGAMA R. I.

H. MUNAWIR SJADZALI

P A D A

MUSYAWARAH BESAR KE III

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM

TANGGAL : 2 – 4 MEI 1985

D I

J A K A R T A

T.U. MENTERI AGAMA R.I.

1 9 8 6





MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI AGAMA R. I.
P A D A
MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN
DAKWAH ISLAM TGL. 2 – 4 MEI 1986 DI JAKARTA.

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, izinkanlah saya mengucapkan selamat ber-MUBES kepada segenap pimpinan dan warga Lembaga Karyawan Dakwah Islam ( LEMKARI ).
Semoga MUBES ini berjalan lancar dan menghasilkan gagasan-gagasan dan program kerja yang mantap, sesuai dengan fungsi dan tujuan LEMKARI dan sejalan dengan Tuntutan-tuntutan bangunan.

Bagi suatu organisasi seperti LEMKARI ini MUBES memang merupakan satu mekanisme organisasi yang sangat penting untuk mengupayakan penyegaran kembali semangat dan tekadnya berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Saudara-saudara keluarga besar LEMKARI yang berbahagia.

MUBES LEMKARI kali ini diselenggarakan di saat mana

bangsa kita telah mempunyai Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana ditetapkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya azas dari setiap organisasi kemasyarakatan. Undang-undang tersebut adalah merupakan pantulan dari kehendak dan tekad bangsa kita untuk melestarikan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui upaya-upaya pembangunan yang berorientasi ke masa depan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu saya menyambut baik MUBES ini yang antara lain juga akan mengambil keputusan-keputusan penyesuaian dengan Undang-undang tersebut yang kini telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985. Bila langkah penting itu telah diambil, hendaknya segera diikuti dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan keikut sertaannya di dalam pembangunan nasional dengan mengerahkan semua potensi yang ada pada LEMKARI, sebagaimana yang ingin dicapai oleh Undang-undang tentang organisasi Kemasyarakatan tersebut. Kita semua menyadari bahwa pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang dicita-citakan itu hanya akan berhasil dengan partisipasi seluruh masyarakat dan bangsa. Dan untuk itu diperlukan adanya stabilitas nasional dan keserasian sosial yang harus diciptakan oleh kita semua. Dengan kata lain, dengan azas Pancasila bagi semua Organisasi kemasyarakatan diharapkan partisipasi dan potensi masyarakat dapat lebih dikerahkan untuk keberhasilan pembangunan, untuk mana diperlukan adanya stabilitas dan keserasian sosial.

*Saudara-saudara peserta MUBES yang berbahagia.*

Kalau kita mau bersikap jujur, sebenarnya pembangunan yang kita laksanakan sejak tahun 1969 yang lalu itu telah banyak membuahkan hasil. Di berbagai bidang pembangunan, baik fisik maupun mental spiritual telah banyak kemajuan yang kita rasakan. Dibidang sosial keagamaan bahkan kita melihat kebangkitan kembali minat masyarakat terhadap kehidupan beragama. Kebangkitan tersebut dengan jelas digambarkan oleh perhatian dan sangat me-



ningkatnya hasrat berpuasa selama bulan Ramadhan, pertumbuhan jumlah rumah ibadah yang sangat pesat, terutama mesjid-mesjid dan musholla, yang beberapa diantaranya diusahakan oleh Pemerintah dan lainnya oleh masyarakat. Pertumbuhan yang pesat dalam jumlah mesjid dapat dilihat, misalnya di Ibukota negara. Jakarta. Sebelum peristiwa Gestapu/PKI pada tahun 1965, jumlah mesjid di kota yang berpenduduk antara enam juta ini hanya sekitar 400 mesjid. Dewasa ini terdapat dari 1600 mesjid yang tersebar di seluruh pelosok kota. Meskipun pertambahan jumlah itu demikian pesat, mesjid-mesjid ini tetap tidak dapat menampung minat umat Islam untuk sembahyang Jum'at, dan karena itulah maka departemen-departemen, kantor-kantor Pemerintah dan bahkan hotel-hotel terpaksa mengadakan sembahyang Jum'atannya sendiri. Yang paling membesarkan hati dari perkembangan-perkembangan itu adalah fakta bahwa lebih dari 80% dari anggota jemaah adalah kaum muda atau remaja. Kebangkitan kembali perhatian masyarakat terhadap kehidupan beragama juga terwujud dalam meningkatkan hasrat masyarakat untuk belajar tentang Islam. Kelompok-kelompok belajar Islam tumbuh bagai cendawan di musim hujan, di segala tingkat sosial dan di semua kelompok masyarakat terutama kaum wanita, pemuda, siswa/mahasiswa perguruan tinggi dan Universitas. Mesjid-mesjid telah berobah fungsi dari sekedar tempat ibadah saja menjadi pusat-pusat serbaguna untuk kegiatan kebudayaan, sosial dan agama Islam.

Perkembangan-perkembangan yang sehat ini disamping menggembirakan tetapi juga menimbulkan berbagai masalah. Yang paling rumit diantaranya adalah kurangnya guru dan da'i yang memenuhi syarat, bukan mereka yang pengertiannya terbatas pengetahuan agama murni, tanpa bantuan dari pengenalan secukupnya akan cabang-cabang ilmu pengetahuan pendukung. Jenis da'i tersebut mungkin cukup untuk generasi yang lalu. Tetapi sekarang kita hidup di dunia yang lebih maju, dengan generasi baru yang jauh lebih intelektual. Terhadap mereka ini para guru agama dan da'i harus dapat memuaskan dorongan ingin tahu dan keragu-raguan intelektualnya, dengan memberi keterangan yang wajar dan rahasia tentang ajaran dan nilai-nilai Islam.

Pada masa yang lampaui, umat Islam mendesak dan menuntut

kesempatan itu, kesempatan untuk memberi sumbangan bagi perkembangan bangsa yang sehat dan seimbang. Kini kesempatan telah terbuka, dan kita tidak ada pilihan selain menyambut kesempatan yang telah lama dinanti-nantikan itu. Kita gembira bahwa dewasa ini semua usaha sedang dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun oleh berbagai organisasi swasta Islam, untuk menghasilkan dalam jumlah yang cukup besar tenaga guru agama dan da'i yang memenuhi syarat, yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam ditambah pengetahuan secukupnya tentang berbagai ilmu pendukung, misalnya ilmu alam, kesehatan, psikologi, sosiologi dan sejarah. Dalam segala usaha itu, kita sadar sepenuhnya bahwa tugas tersebut memang berat dan memerlukan keikut sertaan semua pihak, terutama mereka yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, dalam hal ini tentunya termasuk LEMKARI,KARI, LEMKARI harus tampil lebih aktif lagi dalam ikut menyiapkan tenaga da'i yang ahli dan memiliki keteladanan, tenaga da'i yang memahami secara mendalam ilmu agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan dirinya sendiri

Kecenderungan tersebut juga menyangkut metoda dakwah. Khotbah atau pelajaran yang monolog dari mimbar jauh dari mencukupi untuk sukses ; dakwah masa kini harus mendorong dialog dan diskusi-diskusi baik antara da'i dan anggota-anggota jemaah maupun antara para anggota sendiri. Pendekatan ini terutama penting bagi kelompok pemuda dan siswa-siswa sekolah menengah serta perguruan tinggi. Dalam menghadapi generasi muda, para da'i hendaknya meniru para dokter. Mereka mulai dengan mewawancarai pasien dan mendengarkan keluhan-keluhan atau masalah-masalah mereka sebelum menulis resep. Selanjutnya para da'i harus dapat menyesuaikan diri mereka dengan tingkat intelektual hadirin yang beraneka ragam, dengan menerapkan pendekatan dan bicara dengan bahasa yang paling cocok dengan tiap kategori jemaah.

Aspek organisasi dakwah tidak kurang pentingnya daripada kwalitas da'i dan metoda dakwah. Dakwah individual jauh dari cukup. Harus ada satu atau lebih pusat-pusat yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwah, seperti misalnya mempersiapkan dan mendidik da'i yang memenuhi syarat, menyu-



sun bahan-bahan untuk kategori jemaah yang berbeda-beda, dan akhirnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan dakwah.

Sebagaimana kita ketahui, masalah keuangan selalu merupakan salah satu dari masalah utama yang harus dipecahkan dalam setiap usaha. Kita bersyukur bahwa keterlibatan Pemerintah secara aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah meringankan beban keuangan dakwah, tetapi itu belum memecahkan masalahnya. Dengan demikian maka pengumpulan dana dari umat Islam masih perlu diintensifkan, dengan mengadakan kampanye-kampanye yang teratur dengan baik, dikelola secara terbuka dan diawasi secara ketat, seperti misalnya mobilisasi zakat, infaq dan sodaqah, serta sumbangan bulanan secara sukarela tetapi teratur dari masing-masing anggota masyarakat Islam. Kunci utama dari pada suksesnya suatu pengumpulan dana ialah kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran dan kesungguhan dari para pemimpin. Memang demikianlah, dalam kehidupan masyarakat kita yang semakin maju ini keberhasilan suatu usaha, betapapun kecilnya, disamping organisasi yang baik, juga banyak ditentukan oleh kemampuan kita menggali dana melalui berbagai-potensi dan sumber.

*Para peserta MUBES dan hadirin yang berbahagia.*

Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam MUBES yang berbahagia ini. Saya berharap semoga apa yang saya kemukakan tersebut menjadi satu masukan bagi LEMKARI dalam rangka memperbaharui tekad dan semangatnya sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan baru di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang menurut hemat saya memang memerlukan perhatian dan keikut sertaan banyak pihak, termasuk LEMKARI yang mengkhususkan diri di bidang dakwah.

Sekali lagi saya ucapkan selamat ber-MUBES, semoga sukses dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Wabillahit taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum W. W.

MENTERI AGAMA R. I.

H. MUNAWIR SJADZALI

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO PENGARAHAN**
**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**
**PADA MUSYAWARAKAH BESAR KE–III**
**LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM**
**TANGGAL 3 MEI 1986 DI JAKARTA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Yth. Direktorium Pusat Lembaga Karyawan Dakwah Islam;*
*Yth. Peserta Mubes ke-III Lembaga Karyawan Dakwah Islam ;*
*Yth. Hadirin dan Hadirat.*

**PENDAHULUAN :**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita.
Begitu pula shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Dan kepada kita sebagai umat Muhammad, semoga Allah menyinari hati nurani kita, akal fikiran kita tingkah laku kita dengan sinar taofiq dan hidayah-Nya selama-lamanya, seperti juga Allah SWT menyinari tanah air kita dengan sinar surya-Nya selama-lamanya.

Saya menyambut gembira Mubes ke-III Lembaga Karyawan Dakwah Islam ini, yang berthemakan "Peningkatan Peranan Dakwah Lembaga Karyawan Dakwah Islam dalam pembangunan nasional serta untuk memantapkan kerukunan antar umat Islam dalam pembangunan nasional serta untuk memantapkan kerukunan antar umat beragama di dalam masyarakat Pancasila".



Maka sehubungan dengan ini, saya menyampaikan ucapan selamat kepada segenap warga Lembaga Karyawan Dakwah Islam, disertai dengan harapan dapat kiranya Musyawarah Besar ini berjalan lancar dan mencapai sasaran.

Adalah harapan saya dan juga harapan seluruh umat Islam, agar Lembaga Karyawan Dakwah Islam dapat lebih memantapkan kehadirannya di tengah-tengah bangsa Indonesia dan dapat memberikan angin segar bagi kegiatan dakwah Islamiyah dalam kehidupan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Oleh karena itu menjadi kewajiban Lembaga Karyawan Dakwah Islam untuk lebih meningkatkan peranannya dalam pembangunan nasional, sebab Lembaga Karyawan Dakwah Islam sedikitnya mempunyai tiga kewajiban pokok, yaitu :

a. Lembaga Karyawan Dakwah Islam berkewajiban menyelamatkan Islam dan umatnya dari segala macam ancaman, perselisihan dan ketidak rukunan.
b. Lembaga Karyawan Dakwah Islam berkewajiban meningkatkan kualitas lahir batin, hingga warga Lembaga Karyawan Dakwah Islam, secara individu maupun secara kelompok benar-benar berperan lebih aktif.
c. Lembaga Karyawan Dakwah Islam berkewajiban untuk meningkatkan dakwah Islamiyah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dakwah billisan maupun dakwah bil hal atau dakwah pembangunan. Kemudian meneruskan Islam beserta dakwahnya kepada generasi baru.

Ketiga kewajiban tersebut tidak dapat dilepaskan dari usaha besar bangsa Indonesi dalam pembangunan bangsa, negara dan agama. Dalam usaha besar mewujudkan masyarakat Pancasila yang agamawan dan masyarakat beragama yang Pancasilawan.

Dengan demikian Lembaga Karyawan Dakwah Islam diminta agar dapat :

1. Menterjemahkan gagasan-gagasan pembangunan kedalam bahasa yang dapat dipahami umat Islam khususnya, umat beragama umumnya.
2. Menterjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan umat dan masyarakat.

3. Dengan bahasa dakwah, mendorong masyarakat dan umat Islam, untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembangunan nasional.
4. Memberikan pendapat, saran dan petunjuk terhadap ide dan cara-cara yang dilakukan untuk suksesnya pembangunan nasional.

Apabila keempat hal tersebut diatas dapat dilaksanakan, maka bukan saja dakwah pembangunan itu bisa berhasil, akan tetapi gagasan pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia akan dapat dipenuhi.

**Peningkatan Peranan Dakwah.**

Lembaga Karyawan Dakwah Islam adalah organisasi dakwah dan bukan organisasi politik. Ini berarti bahwa dalam segala kegiatannya Lembaga Karyawan Dakwah Islam benar-benar menangani dan menggarap kegiatan dakwah. Pemusatan pemikiran dan penanganan pada kegiatan dakwah justru akan lebih memantapkan kehadiran Lembaga Karyawan Dakwah Islam ditengah-tengah masyarakat ber-Pancasila dan beragama ini.

Sehubungan dengan ini, perlu kita ungkapkan kembali menangani arti atau makna dakwah. Dakwah ialah memindahkan umat dari satu situasi kesituasi yang lain. Dari situasi dan keadaan yang negatif kepada keadaan yang positif konstruktif. Memindahkan umat dari situasi kekufuran kesituasi keimanan, dari situasi terjajah ke situasi kemerdekaan. Dari situasi kemelaratan ke situasi kemakmuran, dari keadaan mundur ke keadaan maju, dari berpecah belah ke persatuan.

Merubah seseorang yang jahat menjadi soleh, yang maksiat menjadi taat, yang bodoh menjadi berpengetahuan, yang miskin menjadi berkecukupan. Ini kesemuanya masuk dalam cakupan dakwah. Karena itu dakwah mempunyai arti pembentukan individu pembinaan umat dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu pula maka dakwah dapat diartikan "islah" yaitu usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat, memperbaik kerusakan-kerusakan, menghilangkan kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan dimasyarakat. Maka dakwah berarti pembangunan



masyarakat, memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dan memperbaiki bidang-bidang kehidupan masyarakat yang rusak.

Dakwah tidak dapat disempitkan dengan arti khutbah atau pengajian saja. Khutbah pengajian dan penerangan hanyalah merupakan salah satu segi dari pada cara kegiatan dakwah. Inti dari pada dakwah adalah di dalam perbuatan, dalam praktek, karena dakwah harus dapat mewujudkan kebutuhan kehidupan manusia yang utuh, manusia dengan segala totalitasnya. Sebagai contoh, dakwah untuk menghilangkan kemelaratan atau kemiskinan, mungkin tidak akan berhasik kalau hanya dengan nasehat agar tahan menderita, melainkan harus dengan usaha-usaha perbaikan yang nyata di bidang sosial dan ekonomi dengan melaksanakan tuntunan ilmu-ilmu ekonomi dan sosial yang ada dan berpedoman kepada Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Sehubungan dengan ini hendaknya Lembaga Karyawan Dakwah Islam dalam melaksanakan kegiatan dakwah, harus meningkatkan kemampuan memadukan antara usaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan usaha membangun masyarakat. Sebagai sasaran dakwah, umat dan masyarakat kita masih mengalami berbagai kekurangan dan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Lembaga Karyawan Dakwah Islam dalam kegiatan dakwahnya harus dapat membantu mereka, terutama yang mengalami berbagai penderitaan, agar tidak terlantar. Dengan perkataan lain dalam kegiatan dakwah perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan sosial, seperti pelayanan kesehatan, menyantuni yatim piatu dan orang tua usia lanjut dan lain-lain.

Saya bersyukur dan bergembira, bahwa dalam kegiatan dakwah, Lembaga Karyawan Dakwah Islam, telah meningkatkan kegiatan dakwahnya dengan menggalakkan olah raga, membina generasi muda, mengadakan mixed farming, rumah-rumah ibadah (masjid) dan lain-lainnya, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Lembaga Karyawan Dakwah Islam harus mempunyai saham dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yang hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional merupakan amal usaha per-

baikan dan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Menurut pemahaman serta keyakinan saya, pembangunan nasional adalah termasuk cakupan dakwah. Pembangunan nasional merupakan amal usaha perbaikan dan pembangunan bangsa, negara dan juga agama. Karena pembangunan nasional termasuk kegiatan dakwah, maka sudah sewajibnya Lembaga Karyawan Dakwah Islam ikut serta secara aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional. Karyawan Dakwah Islam harus mempunyai saham dalam pembangunan nasional ini, menurut kadar kemampuannya. Sewajibnya Lembaga Karyawan Dakwah Islam meningkatkan partisipasinya, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan dan atau dalam menikmati hasil pembangunan. Partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata.

Pembangunan bertujuan membangun manusia, dan agama bertujuan untuk kebahagiaan umat manusia juga. Pembangunan memerlukan nilai agama dan agama memberi bentuk kepada kwalitas hidup. Kalau tidak begitu, kemungkinan pembangunan itu kehilangan tujuannya, kedalamannya dan keindahannya. Masalah yang perlu dipikirkan lebih lanjut ialah bagaimana mewujudkan cita keagamaan itu dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam lingkungan masyarakat yang sedang membangun.

Hal ini berarti mempresentasikan fungsi agama dalam kehidupan umat beragama secara kongkrit dan positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disinilah fungsi pokok dari pada agama, yakni sebagai faktor motivatif, pengendali, pengarah dan pengimbang dalam bentuk penanamkan iman, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**Pembangunan Nasional.**

Faktor yang menentukan dalam setiap pembangunan adalah manusia. Manusia yang harus melaksanakan dan mewujudkan rencana-rencana pembangunan tersebut. Manusia adalah pelaksana sekaligus sasaran tujuan pembangunan. Ditangan orang yang tidak bertanggung jawab, modal dan tekhnologi akan dapat membahayakan pribadi manusia dan masyarakatnya. Karena itu dalam



kita melaksanakan pembangunan, tidak dengan semboyan tujuan menghalalkan cara. Sehingga segala cara dapat ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan bangsa Indonesia terikat pada dasar perjuangannya yaitu Pancasila, UUD '45 dan agama. Republik Indonesia lahir sebagai wahana perjuangan yang didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara untuk membawa rakyat Indonesia ke cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Cita-cita ini harus dicapai menurut cara yang dijiwai Pancasila. Sehingga dalam mengejar cita-cita tersebut tidak boleh menyimpang dari jiwa, semangat, moral dan pandangan hidup Pancasila. Yakni pembangunan bangsa Indonesia bukan saja harus menghasilkan kemakmuran, tapi juga harus menghasilkan keadilan sosial. Bukan saja mementingkan pembangunan kebendaan lahiriah, tapi juga bidang rohaniah kejiwaan. Menghasilkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kemajuan lahir dan kemajuan batin.

Dalam kerangka fikiran inilah menjadi penting bahwa pembangunan hanya ditujukan mencapai pendapatan yang senantiasa meningkat tapi pembangunan juga harus ditujukan untuk memperoleh pendapatan yang halal. Karena itu, segala langkah dan tindak yang menyimpang dari garis halal ini harus dikoreksi dan ditiadakan. Sehingga tindakan memberantas korupsi, penyelewengan, penyuapan dan lain-lain hal yang serupa, merupakan bagian integral dari kebijaksanaan umum pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Sejalan dengan ini maka kebijaksanaan pembangunan yang bertujuan menegakkan keadilan sosial, secara sadar memilih sebagai sasaran kegiatan pembangunan yaitu rakyat banyak, terutama golongan ekonomi lemah, petani kecil, nelayan kecil, pengusaha dan buruh kecil, serta semua rakyat kecil yang perlu ditingkatkan kesejahteraan lahir batinnya.

Kebijaksanaan pembangunan serupa ini perlu diiringi dengan langkah tindak yang menumbuhkan semangat solidaritas sosial, sikap tenggang rasa tepo seliro dan lain-lain hal yang membangkitkan kesadaran diri seseorang, bahwa selaku makhluk sosial ia perlu memperhatikan sikap hidup masyarakat yang sedang membangun.

GBHN 1983 telah mene

GBHN 1983 telah menetapkan model pembangunan yang paling tepat bagi bangsa Indonesia, yaitu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Seluruh pembangunan nasional kita yang merupakan suatu kesatuan sistem yang utuh-merupakan subsistem dari sistem pokok yaitu Pancasila dan UUD 45.
Konsekwensi dari pemikiran ini lebih lanjut adalah pembangunan nasional kita harus ditujukan untuk melaksanakan semua sila dari Pancasila. Dengan ungkapan lain : Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila ini, stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi harus selalu dikaitkan dengan lima sila dari Pancasila yaitu :

1. Peningkatan dalam kehidupan beragama, kepercayaan serta peningkatan moral, akhlak budi pekerti yang luhur (Sila Pertama).
2. Peningkatan martabat dan harkat kemanusiaan dengan hak-hak dan tanggung jawab kemanusiaan (Sila Kedua).
3. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan bangsa, cinta tanah air, cinta Kemerdekaan (Sila Ketiga).
4. Peningkatan kesadaran kehidupan bernegara secara tertib berdasarkan konstitusi dan kesadaran mewujudkan kehidupan demokrasi Pancasila (Sila Keempat).
5. Peningkatan pemerataan kesejahteraan lahir batin dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Kelima).

Pelaksanaan Pancasila sebagai model pembangunan nasional, pendekatannya tidaklah dogmatis, doktriner, tapi luwes, dinamis, realistis dan kreatif serta memperhatikan : — Keagamaan-kemanusiaan—persatuan bangsa serta kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pembangunan nasional sebagai realisasi Pancasila, pada hakekatnya adalah daya upaya atau ihtiar segenap bangsa Indonesia untuk mengadakan, perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas kehidupan bangsa yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan menyeluruh. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan nasional, tetap memperhatikan identitas, watak dan kepribadian kita sebagai bangsa sehingga pelaksanaan pembangunan



tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang mengganggu pertumbuhan bangsa.
Atas dasar inilah maka watak dan ciri ke-Indonesiannya harus tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya.
Pembangunan nasional, merupakan usaha memelihara dan mengembangkan kepribadian nasional yang kreatif dan dinamis, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dalam rangka mengembangkan potensi jasmaniah dan rohaniah, materiil dan spiritual, maka faktor agama mempunyai arti dan peranan penting, justru karena pembangunan yang kita laksanakan adalah bertujuan untuk membangun Manusia seutuhnya, yaitu manusia yang sejahtera lahir batinnya untuk kepentingan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Ibarat orang yang sedang membangun gedung, kita sekarang membangun gedung Pancasila yang harus melindungi dan mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia sepanjang masa. Gedung ini harus benar-benar kokoh, oleh karena itu fundamen gedung ini juga harus besar dan kokoh kuat. Maka apa yang kita sekarang sedang kerjakan ialah meletakkan fondamen gedung tersebut. Oleh karena itu pula gedung ini belum menampakkan wujudnya sebagaimana kita cita-citakan.
Menurut GBHN, gedung atau masyarakat yang kita cita-citakan, baru akan terwujud setelah dilaksanakan 6 pelita dan seterusnya. Dewasa ini pelita demi pelita sedang berjalan, dimana kita sedang melaksanakan Pelita IV. Pelita ke IV adalah merupakan kerangka landasan, yang kokoh serta akan diperkokoh lagi pada Pelita ke V, sehingga pada Pelita ke VI dapat lepas landas atau maju dan berkembang dengan kemampuan sendiri.

Apa yang kita lakukan bersama dalam Pelita IV ini, adalah mewujudkan sendi-sendi utama yang kokoh di berbagai bidang kehidupan : ekonomi, agama, sosial budaya, politik dan keamanan untuk memberi pijakan yang kokoh dan arah yang setepat-tepatnya baji perjalanan pembangunan kita seterusnya menuju masyarakat Pancasila yang dicita-citakan.
Pada Pelita IV ini ingin terwujud : Secara idiologi bangsa kita telah mantap — secara politis kita telah matang — secara ekonomis kita telah kuat — secara budaya kita telah mapan, secara hankam

kita telah siaga secara agama kita telah iman dan taqwa.
Repelita IV harus dapat mengusahakan percepatan tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, karenanya Pelita IV disusun dengan jangkauan jauh ke depan, melampaui kurun waktu lima tahun mendatang, menjelang berakhirnya abad ke 20 dan mulainya abad ke 21.

Pembangunan nasional sebagai realisasi dari tujuan Nasional, pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan akhirnya adalah kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras. Keselarasan hubungan antar manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat. Secara ringkas disebut masyarakat maju, adil makmur berdasarkan Pancasila, yang diridhoi oleh Allah (Baldatun toyibatun Wa Robbun Ghafur). Jelaslah bahwa pembangunan nasional, menurut hemat saya termasuk dalam ruang lingkup da'wah. Secara langsung menyangkut umat beragama, khususnya umat Islam. Berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut akan dirasakan oleh umat beragama, oleh karena muslimin. Sehubungan dengan hal itu", seluruh kaum muslimin haruslah mengambil peranan untuk mengsukseskan pembangunan untuk memperbaiki nasib bangsa. Pembangunan nasional yang sedang kita lakukan merupakan kegiatan hablum minanas sekaligus meletakkan landasan hablum minallah. Apabila ditingkatkan peran Lembaga Karyawan Dakwah Islam dalam hablum minanas ini, maka peran ini akan dapat meningkatkan amal saleh dan ketaqwaan Lembaga Karyawan Dakwah Islam dan sekaligus menjadikannya warganegara yang baik.

**Kerukunan Hidup Beragama.**

Bangsa Indonesia telah memiliki landasan untuk membina kerukunan hidup umat berbagai agama, baik yang bersifat filsolofis maupun yang bersifat pragmatis. Yang pertama adalah dasar falsafah negara Pancasila dan yang kedua adalah tugas nasional bersama pembangunan nasional.

Sebagai landasan bersama bagi semua golongan agama, Pancasila mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang bisa diterima



oleh semua pihak. Sedangkan pembangunan nasional adalah tugas nasional yang semua fihak berkewajiban melaksanakan dan mensukseskannya. Oleh karena itu di atas kedua landasan tersebut dapat dikembangkan kerukunan dan kerjasama umat berbagai agama.

Adalah suatu hal yang benar-benar harus disadari bahwa pertentangan dan benturan dalam kehidupan umat beragama, akan mengganggu baik stabilitas nasional maupun kehidupan agama itu sendiri. Ketidakrukunan dalam kehidupan keagamaan pasti akan menimbulkan pronlema-problema sosial, politik, ekonomi dan keagamaan yang sangat jauh dan luas akibat-akibatnya. Itulah sebabnya maka membina kerukunan hidup umat beragama perlu beroleh penanganan yang hati-hati dan sungguh-sungguh.

Sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nyalah, kita memiliki dasar dan falsafah negara yang mantap Pancasila, yang merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab dengan Pancasila bangsa Indonesia tetap dalam kesatuan dan persatuan yang utuh, dalam keyakinan yang satu, yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu pemerintahan dan satu kesatuan tekad untuk mengisi kemerdekaan dan mengsukseskan pembangunan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur lahir batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan, dimana tidak ada pertentangan interen umat beragama, antar golongan-golongan agama dan antara umat beragama dengan Pemerintah. Ia adalah keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud :

a. Saling menghormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
b. Saling hormat menghormati dan bekerja sama interen pemeluk agama antar berbagai golongan agama dan antar umat beragama dengan Pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara, serta agama.
c. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.

Saya sangat bergembira bahwa Lembaga Karyawan Dakwah Islam berkehendak untuk lebih memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama di dalam masyarakat Pancasila. Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama telah kita bentuk, yang merupakan forum konsultasi dan komunikasi antara pemuka dan pemimpin agama, yang tergabung dalam Majlis-majlis Agama, yaitu : MUI (Majlis Ulama Indonesia) — Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Majlis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) — Parisida Hindu Dharma Pusat (PHDP) dan Perwalian Umat Budha Indonesia ( WALUBI ).

Wadah ini bertujuan untuk memberikan fasilitas para pemimpin dan pemuka agama untuk bertemu dan saling merundingkan soal-soal nasional baik soal agama maupun soal lain untuk kepentingan umat beragama, sehingga menumbuhkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa memperkuat kepribadian Indonesia, gotong royong dan kesetiakawanan berdasarkan Pancasila, tanpa meninggalkan akidah/ajaran agama masing-masing.



**Penutup .**

Para Karyawan Dakwah Islam diharapkan berperan dalam membuktikan bahwa keberagamaan kita bukanlah penghambat melainkan justru mendorong bagi kemajuan bangsa. Tantangan ini harus dijawab bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan yang nyata. Pengabdian aspek-aspek mental keagamaan telah menyebabkan kekosongan rohani, yang menjerumuskan kehidupan manusia kepada kekerasan dan kebiadaban. Kekosongan rohani itu tidaklah kalah bahayanya dari pda pengotoran dan perusakan lingkungan hidup alam kita. Nilai dan makna keberagamaan tidaklah terletak pada kesemarakan pada sikap dan tingkah laku kita sebagai umat beragama.

Keberagamaan mestinya menjadikan kita memiliki kekuatan moral dan rohani yang mampu merobah diri dan lingkungan kita.

Maju mundurnya umat Islam di masa mendatang sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan umat Islam sendiri dalam meningkatkan peranannya dalam pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan sebagai realisasi dari Iman, Ilmu dan Amal Saleh. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita dan selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

**ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA**

## PENJELASAN DIR. PUS. LEMKARI DALAM MUBES. LEMKARI KE – III

*Assalaamu'alaikum warokhmatullohi wabarokatuh.*

*Yth. Bapak. Menteri Agama R.I. yang kami hormati.*
*Yth. Bapak Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya yang kami hormati*
*Yth. Bapak Ketua D.P.P. Majelis Dakwah Islamiyah yang kami hormati*
*Yth. Bapak/Ibu tamu undangan yang kami hormati dan segenap peserta MUBES LEMKARI dan warga LEMKARI yang kami sayangi.*

1. Alkhamdulilah wa syukurilah wa laa khaula wa laa quwwata illa billah, kita panjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rakhmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan khusus atas izin-Nya dalam menghadiri resepsi pembukaan MUBES—LEMKARI pada saat sekarang ini.
2. Demikian pula teriring kesyukuran kita kepada Allah SWT. kami mengucapkan diperbanyak terima kasih kepada segenap hadlirin tamu undangan beserta massa warga LEMKARI yang telah rela meluangkan waktu membuang langkah untuk menghadliri undangan resepsi pembukaan MUBES—LEMKARI yang ke III ini.
3. Semoga kehadliran Bapak-bapak Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian dapat menjadi amal-sholih disisi Allah dan semoga MUBES—LEMKARI ini mendapatkan ridho Allah hingga dapat menjadi penopang dan penunjang program serta realisasi Pembangunan-Nasional yang tengah kita galakkan dewasa ini.
4. Yth. Bapak Menteri Agama serta para tamu undangan yang kami mulyakan, kami mohon berkenannya dalam kesempatan ini untuk sedikit menguraikan peran LEMKARI beserta MUBES-nya dengan maksud agar nantinya existensi LEMKARI benar-benar dikenal sebagai komponen Orde Baru yang meyakinkan.



5. Uraian yang akan kami sajikan merupakan uraian singkat tetapi walaupun kami persingkat tidak akan mengurangi kejelasannya hingga Bapak-Ibu tamu undangan mendapatkan gambaran yang jelas tentang LEMKARI pada saat sekarang dan untuk waktu mendatang.
6. LEMKARI sebagai lembaga dakwah keagamaan didalam konstelasi masyarakat Pancasila mengemban dua tugas pokok esensial yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, bahkan antara kedua tugas pokok ini terjalin hubungan yang inhaerent sekali.
7. Bahwasannya kehidupan kita didunia ini mengikat dua makna kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini dapat di-ilustrasikan sebagai mata uang dengan kedua belah sisinya, sebuah sisi kehidupan kita adalah sebagai mahluk ciptaan Allah sedangkan sisi lainnya adalah sebagai insan masyarakat berwarga negara Republik Indonesia.
8. Peningkatan harkat dan martabat kehidupan kita, berarti peningkatan kedua sisi kehidupan tersebut yang kait-mengkait, baik sebagai mahluk yang memperhambakan dirinya kepada Allah maupun sebagai insan warga negara dalam menegakkan Negara Kesatuan R.I. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
9. Peningkatan kedua sisi kehidupan tersebut harus berjalan relevantif-proporsional yang wajar, dengan didukung oleh kesadaran dan tanggung jawab sebagai insan yang taqwa kepada Allah SWT. dengan amal-sholihnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam wadah Negara Kesatuan R.I.
10. Dalam Era-pembangunan untuk mengisi kemerdekaan negara yang telah kita proklamirkan semenjak 17-Agustus-1945, LEMKARI merasa terpanggil untuk menyiapkan program dakwah pembangunan yang komprehensif, dan kemudian merealisirnya hingga nyata-nyata kehidupan kita sebagai hamba Allah dan sebagai warga negara R.O. memberikan wujud tercapainya masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baldatun toyyibatun wa Robbun ghoffur.

11. Dalam kaitan dengan penataan dan pelurusan kehidupan berorganisasi yang diarahkan untuk memantapkan ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 8 tahun 1985, maka LEMKARI dalam mengemban mission-sacrenya, dapat menerima dengan penuh kesadaran untuk menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal berorganisasi seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang no. 8 tahun 1945

12. Selanjutnya LEMKARI sebagai lembaga dakwah keagamaan dalam meningkatkan kehidupan sebagai umat dan sebagai warga negara-negara, berpandangan bahwa titik berat dakwah harus diletakkan dalam mendidik, menyadarkan dan meyakinkan dalam mencapai kebenaran dan kesejahteraan.
Sehingga karena itu maka dakwah harus mempunyai motivasi yang kuat dan mendasar/fundamental sebagai pembangkit dan pendorong untuk mewujudkan kebenaran, dalam kaitan ini maka LEMKARI menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul beserta falsafah Pancasila sebagai dasar motivasi dakwahnya.

13. Dengan bertolak dari motivasi dakwah yang kuat dan mendasar tersebut kita polakan suatu sistim dakwah yang terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga mampu membeeri pembinaan in concreto dalam menghadapi situasi hidup bangsa kita dalam kurun waktu menggalakkan pembangunan.

14. Dengan sistim dakwah terarah dimaksudkan agar mampu mempersiapkan peserta-peserta didik untuk hidup layak sebagai manusia dalam kurun zamannya dengan serba macam peluang, tantangan dan hambatan yang dihadapinya.

15. Dengan sistim dakwah terpadu dimaksudkan agar dalam pembinaan peserta-peserta didik berbagai bakat dan kemampuan yang ada pada peserta-didik dapat dimekarkan secara berimbang sehingga berbagai peluang dalam kehidupan dapat digarap bersama-sama dalam kesatuan tindak yang tertata demi kepentingan seluruh masyarakat.

16. Dengan sistim dakwah menyeluruh dimaksudkan agar dalam kawasan hidup suatu bangsa, segala usaha yang harus ditangani untuk kelestarian hidup bangsa sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam, dapat ditanggulangi oleh seluruh warga bangsa dalam kebersamaan.
Visi dan strategi dakwah yang dipolakan menjadi sistim dakwah yang terarah, terpadu dan menyeluruh adalah yang diidealkan dalam GBHN.

17. LEMKARI berpandangan bahwa sistim dakwah terarah, terpadu dan menyeluruh, hanya dapat dicapai bila terdapat suatu sistim, dan struktur dakwah yang mampu menampung berbagai tingkatan peserta-didik, mampu menampung, setiap peluang waktu peserta didik dan mampu memberikan umpan yang dihajadkan oleh pserta didik.

18. Dalam kaitan memenuhi persyaratan inilah maka LEMKARI dalam kegiatan dakwahnya menggunakan sistim pendidikan kemasyarakatan yang non formal dan non klasikal dengan segenap usahanya yang ditujukan untuk memenuhi hajad massa dalam mengembangkan hikmah-hikmah penghayatan ajaran agama Islam untuk mencapai ketenteraman dan keselarasan hidup dunia dan akherat dalam menunjang pembangunan bangsa.

19. Demikianlah setelah sedikit kami uraikan tentang motivasi, visi dan sistim dakwah LEMKARI kami akan mengkaitkannya dengan apa yang harus dibenahi dalam MUSYAWARAH BESAR LEMKARI yang ke III ini yang sebentar lagi akan dibuka dengan resmi oleh Yth. Bapak Menteri Agama.

20. Musyawarah Besar LEMKARI merupakan periodisasi jadwal kegiatan LEMKARI yang ditargetkan untuk waktu 5 tahun dan diatur dalam Anggaran Dasar LEMKARI Bab VIII Pasal 19 ayat 1 dengan maksud bahwa periode waktu 5 tahun ditetapkan langkah-langkah organisasi yang meliputi program umum dan personalia kepengurusan serta langkah-langkah lainnya dalam meningkatkan pembangunan.

21. Kehidupan organisasi LEMKARI yang dicerminkan oleh gerak dan langkahnya, seiring dengan kelahirannya dalam masa Orde Baru/Orde Pembangunan, maka ia harus responsif terhadap masalah-masalah yang timbul dan berlangsung dalam era pembangunan ini.

22. Karena itulah maka merupakan keharusan bahwa dalam MU-

BES LEMKARI yang akan berlangsung dalam beberapa hari ini, sebanyak mungkin diinventarisir masalah-masalah yang relevant dengan kehadiran LEMKARI sebagai organisasi komponen Orde Baru untuk memberikan jawaban terhadap tantangan dan hambatan yang timbul sebagai akibat dari pembangunan dan pembaharuan yang kita canangkan.

23. Demikian juga MUBES LEMKARI ini yang merupakan forum pertemuan warga LEMKARI yang berasal dari segenap penjuru tanah air dapat merupakan wadah kegiatan konsolidasi organisasi untuk antara lain :

    1. Menghimpun segenap LEMKARI yang diarahkan untuk melancarkan misi dakwahnya baik sebagai lembaga pendidikan keagamaan maupun sebagai lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam menunjang program Golongan Karya mensukseskan pembangunan Nasional.
    2. Menyusun program dan men-serempakkan langkah yang dalam misi-nya bertujuan meningkatkan penghayatan beragama bagi umat Islam agar dapat mendorong kreativitas baik individual maupun kemasyarakatan yang mengarah kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dalam konteks pembangunan bangsa, sesuai dengan penggarisan dalam GBHN dan P—4.
    3. Menyelenggarakan proses regenerasi dimana bagi generasi sebelumnya dapat memberikan pengalamannya kepada generasi penerus, sebaliknya generasi penerus diarahkan dapat mengenal problema-problema secara kritis-obyektif agar dapat dibangkitkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis namun tetap pada landasan ideologi Pancasila untuk mencapai tujuan kemerdekaan melalui keseluruhan proses pembangunan yang tengah kita kerjakan sampai saat sekarang ini.

24. Ketiga masalah pokok tersebut perlu diolah dalam MUBES LEMKARI ini agar menghasilkan hidangan yang bergizi berupa Keputusan-keputusan MUBES yang dapat meningkatkan daya guna dan daya usaha organisasi LEMKARI sebagai komponen Orde Baru dalam lingkungan keluarga besar Golongan Karya.



25. Akhirulkalam kami dari DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI melalui forum MUSYAWARAH BESAR ini mengajak seluruh warga LEMKARI serta Keluarga Besar Golongan Karya untuk bersama menatap kedepan, menyingsingkan lengan baju, bekerja keras dalam bersama-sama mewujudkan cita-cita perjoangan Orde-Baru.
    Dan marilah kita siapkan diri kita untuk mensukseskan Pemilu 1987 dengan memenangkan Golongan Karya sebagai jaminan terpeliharanya kontinuitas dan kelangsungan pembangunan sampai lepas landas.

26. Semoga Allah SWT memberikan taufiq-hidayah serta ridho-Nya atas segala niat baik dan usaha kita semua dan kepada para peserta MUBES utusan dari daerah-daerah kami ucapkan selamat bermusyawarah dan selamat meneruskan perjoangan Orde-Baru.
    Dengan LEMKARI kita jayakan GOLKAR dan kita menangkan ORDE—BARU.

Robbana auziqna an asykuro nikmatakallati an amta alaina, wa an akmala sholihan tardhohu wa adkhilna birokhmatika fii ibadikas sholihin.

Allohuma inna nasaluka ridhoka wal jannah wa na udobika minsakhotika wannar Robbana atina fiddunya khasanah wa fil akhiroti khasanah waqina adhabannar.

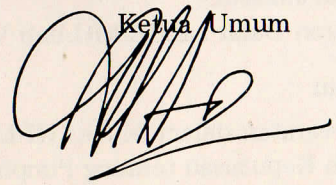
Amin, Amin ya Robbalalamin.

Wassalaamu alaikum warokhmatullohi wabarokatuh.

Jakarta, 2 Mei — 1986

DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI

Ketua Umum



( R. H. EDDY MASIADI ).

## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( L E M K A R I )

*Nomor : I/MUBES—III/LEMKARI/1986*

*Tentang :*

*PIMPINAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( L E M K A R I )*

**Menimbang :**

1. Bahwa Musyawarah Besar Ke-III LEMKARI yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 1986 di Jakarta.
2. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban jalannya pemusyawaratan dan rapat-rapat dalam Mubes III LEMKARI dimaksud perlu ditetapkan/disyahkan Pimpinan Mubes yang berwenang untuk memimpin rapat-rapat dalam Mubes tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu perlu adanya Keputusan tentang Pimpinan Mubes III LEMKARI.

**Mengingat :**

1. Keputusan Dirpus LEMKARI Nomor : 313/KPTS/DP/C/85 tanggal 25 Oktober 1985 mengenai MUBES III LEMKARI 1986 di Jakarta.
2. Anggaran Dasar LEMKARI bab VIII pasal 19.

**Memperhatikan :**

Permusyawaratan dalam Mubes III LEMKARI yang membahas Rancangan Keputusan tentang Pimpinan Mubes III LEMKARI.

**M E M U T U S K A N :**

*Menetapkan* : Keputusan Musyawarah Besar ke III LEMKARI tentang Pimpinan Mubes III LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Islam).

*Pertama* : Pimpinan Mubes III LEMKARI dipilih dari dan oleh peserta Mubes didalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta.

*Kedua* : Pimpinan Mubes III LEMKARI merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

*Ketiga* : Tugas dan wewenang Pimpinan Mubes III LEMKARI :

1. Memimpin rapat-rapat selama Mubes III LEMKARI.
2. Menjaga kelancaran dan ketertiban berlangsungnya Mubes III LEMKARI tersebut.

*Keempat* : Pembagian tugas diantara unsur-unsur Pimpinan Mubes III LEMKARI tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua.

*Kelima* : Komposisi dan Personalia Pimpinan Mubes III LEMKARI terdiri dari :

| | |
|---|---|
| 1. Ketua | : Ir. Prasetyo Soenaryo |
| 2. Wakil Ketua | : Ir. H. Kemal Abu Saifan A. |
| 3. Sekretaris | : Drs, Bambang Purnomo |
| 4. Wk. Sekretaris | : Kasmudi Assiddiqi |
| 5. Anggota | : Ir. H. Abdul Malik |
| | Ir. Abdullah Syam |
| | Drs. Juharsa |
| | Drs. Soenaryo |

*Keenam* : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

*Ketujuh* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 1986

DIREKTORAT PUSAT LEMKARI
SELAKU
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA KE I
MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

Ketua :

R. H. EDDY MASIADI

Sekretaris :

DRS. H. SYAMSUDDIN





## KEPUTUSAN MUSYAWARAH KE III
## LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( L E M K A R I )

*Nomor : II/MUBES—III/LEMKARI/1986*
*Tentang :*
*PERATURAN TATA TERTIB*
*MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI 1986*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

**Menimbang :**

1. Bahwa Musyawarah Besar Ke III LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 1986.
2. Bahwa untuk terselenggaranya Musyawarah Besar dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai hasil guna yang optimal sesuai cita-cita organisasi, perlu adanya peraturan mengenai tata tertib dan tata laksana Musyawarah Besar ke III tersebut.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib MUBES III LEMKARI 1986 sebagai kesepakatan bersama yang akan dipatuhi bersama dalam pelaksanaan Mubes III tersebut.

**Mengingat :**

1. Anggaran Dasar LEMKARI Bab IX Pasal 20 dan Pasal 21.
2. Keputusan Dirpus LEMKARI Nomor : 313/KPTS/DP/X/85 mengenai MUBES III LEMKARI 1986 di Jakarta.
3. Keputusan MUBES III LEMKARI Nomor : I/MUBES/—III/LEMKARI/1986 tentang Pimpinan Mubes-III LEMKARI 1985.

**Memperhatikan :**

1. Permusyawaratan dalam Mubes III LEMKARI yang membahas Rancangan Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib MUBES III LEMKARI.
2. Keputusan Rapat Paripurna ke I MUBES III LEMKARI 1986.

**M E M U T U S K A N :**

*Menetapkan* : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUBES III LEMKARI 1986.

*Pertama* : Peraturan Tata Tertib Musyawarah Besar ke III Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) secara lengkap dan terinci adalah seperti tertulis dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

*Kedua* : Peraturan Tata Tertib MUBES III LEMKARI 1986 seperti dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan pedoman dan pegangan untuk pelaksanaan permusyawaratan dan rapat-rapat selama Mubes III LEMKARI 1986 ini.



*Ketiga* : Peraturan Tata Tertib seperti dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya berlaku untuk MUBES III LEMKARI 1986 ini.

*Keempat* : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Kelima* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 1986

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( L E M K A R I )

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMKARI
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

P I M P I N A N,
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )

K e t u a,

( Ir. Prasetyo Soenaryo )

S e k r e t a r i s,

(Drs. Bambang Purnomo)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MUBES III LEMKARI 1986 DI JAKARTA
NOMOR : II/MUBES—III/LEMKARI/1986
TANGGAL : 2 MEI 1986.

*PERATURAN TATA TERTIB MUBES KE III*
*LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( L E M K A R I )*
*1986 DI JAKARTA.*

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

**Pasal 1.**

1. Musyawarah Besar LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Islam) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang selanjutnya dalam Peraturan Tata Tertib ini disebut MU-. BES III LEMKARI.
2. Musyawarah Besar ke III LEMKARI dalam melakukan tugas-nya berpedoman Azas Tunggal Pancasila, UUD 1945, TAP MPR No. IV/MPR/1978, Keputusan MUNAS III GOLKAR 1983 dan Anggaran Dasar LEMKARI.
3. Peserta MUBES III LEMKARI terdiri dari para peserta seperti dimaksud pada Bab III pasal 3 Peraturan Tata Tertib ini.

## BAB II
## TUGAS DAN WEWENANG

**Pasal 2.**

Musyawarah Besar ke III LEMKARI mempunyai tugas dan wewe-nang untuk :

1. Menetapkan/merubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI.
2. Menetapkan/merubah/menyempurnakan Program Umum LEMKARI.



3. Mengeluarkan Pernyataan dan Garis Kebijaksanaan Organisasi yang dirasakan perlu.
4. Memilih dan mengangkat Dewan Kyrator (Pemangku Azas) dan Direktoium Pusat LEMKARI Periode 1986—1991.
5. Menetapkan Surat Keputusan lainnya yang dirasakan perlu.

## BAB III
## P E S E R T A

**Pasal 3.**

1. Peserta MUBES III LEMKARI terdiri dari :
   a. Dewan Kurator LEMKARI
   b. Direktorium Pusat LEMKARI
   c. Utusan Perwakilan LEMKARI Daerah Tingkat I se Indo-nesia.
   d. Utusan Senat LEMKARI Daerah Tingkat II/Kabupaten/ Kodya se Indonesia.
   e. Tokoh dan Ulama LEMKARI yang dianggap perlu.
2. Jumlah dan perincian Peserta diatur lebih lanjut oleh DIRPUS LEMKARI.
3. Setiap Peserta wajib membawa Surat Mandat dari daerah ma-sing-masing.
4. Ketentuan mengenai Surat Mandat diatur oleh DIRPUS LEM-KARI.

## BAB IV
## HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

**Pasal 4**

Peserta MUBES III LEMKARI berhak untuk :

1. Mengajukan pertanyaan.
2. Mengajukan usul perubahan.
3. Mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.
4. Menyatakan suara sebagaimana diatur dalam Bab X pasal 26 Peraturan Tata Tertib ini.
5. Memilih dan dipilih.

**Pasal 5**

1. Semua pertanyaan disusun secara singkat dan jelas, disampaikan kepada Pimpinan Mubes.
2. Pimpinan Mubes berhak mengambil kesimpulan dari hasil pertanyaan terserbut.

**Pasal 6**

Pengambilan Keputusan dalam Rapat Komisi dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila hal ini tidak mungkin dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 7**

Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Tata Tertib ini.

## BAB V
## ALAT-ALAT KELENGKAPAN MUBES

**Pasal 8**

Alat-alat kelengkapan MUBES III LEMKARI disusun sesuai dengan pengelompokan kegiatan pelaksanaan tugas MUBES.

**Pasal 9**

Musyawarah Besar ke III LEMKARI mempunyai Alat-alat kelengkapan sebagai berikut :

1. Pimpinan MUBES III LEMKARI.
2. Komisi-komisi MUBES III LEMKARI
3. Sekretariat MUBES III LEMKARI

## BAB VI
## PIMPINAN MUBES

**Pasal 10**

1. MUBES III LEMKARI dipimpin oleh Pimpinan MUBES yang dipilih dari dan oleh Peserta dalam Rapat Paripurna.
2. Rapat Paripurna yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Direktorium Pusat LEMKARI terdahulu.
3. Pimpinan MUBES III LEMKARI bersifat kolektif, yang personalianya dipilih dari unsur-unsur :



   1) Dewan Kurator LEMKARI
   2) Direktorium Pusat LEMKARI
   3) Perwakilan LEMKARI Daerah Tingkat I
   4) Senat LEMKARI Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kodya
4. Komposisi Pimpinan Mubes III LEMKARI terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, Seorang Wakil Sekretaris dan beberapa anggota.
5. Wewenang Pimpinan MUBES III LEMKARI ialah :
   1) Memimpin rapat-rapat selama MUBES III LEMKARI 1986
   2) Menjaga kelancaran dan ketertiban musyawarah dan rapat-rapat selama MUBES III.
6. Pembagian tugas diantara unsur-unsur Pimpinan MUBES III LEMKARI diatur lebih lanjut oleh Ketua.

## BAB VII
## KOMISI + KOMISI

**Pasal 11**

MUBES III LEMKARI membentuk Komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 12**

1. Komisi MUBES III LEMKARI bertugas memusyawarahkan dan mengambil Keputusan tentang masalah-masalah yang menjadi acara Rapat Komisi dalam bidang lingkup tugasnya.
2. Hasil permusyawaratan Komisi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Mubes.
3. Komisi Mubes III LEMKARI memberikan laporan kepada Rapat Paripurna tentang hasil karya masing-masing.
4. Komisi-komisi dibantu Sekretariat Panitia Mubes.
5. Pembicaraan dalam Rapat Komisi disusun dalam suatu risalah.

**Pasal 13**

1. Setiap peserta diwajibkan menjadi anggota salah satu Komisi Mubes III LEMKARI, kecuali Dewan Kurator.
2. Susunan dan jumlah anggota Komisi ditentukan oleh Pimpinan Mubes dalam Rapat Paripurna.
3. Pimpinan Mubes dapat menghadiri dan turut serta dalam semua Rapat Komisi untuk melakukan tugas koordinasi.

Pasal 14.

1. Pimpinan Komisi Mubes III LEMKARI terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
2. Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Mubes.
3. Pimpinan Komisi Mubes III LEMKARI merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.

## BAB VIII
## MUSYAWARAH DAN RAPAT–RAPAT

Pasal 15

Musyawarah Besar ke III LEMKARI terdiri dari serangkaian jenis-jenis rapat :

1. Rapat Paripurna Mubes
2. Rapat Pimpinan Mubes
3. Rapat Komisi Mubes

Pasal 16

Rancangan Jadwal Acara Mubes disampaikan oleh Pimpinan Mubes kepada Rapat Paripurna untuk disyahkan.

Pasal 17

1. Peserta berbicara setelah mendapat izin dari Ketua Rapat.
2. Ketua Rapat hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya.
3. Apabila Ketua Rapat hendak berbicara menggunakan haknya sebagai peserta, maka ia menyerahkan Pimpinan Rapat kepada yang lain dan untuk sementara ia meninggalkan tempat duduknya.
4. Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbicara.
5. Sebelum berbicara, para pembicara terlebih dahulu mendaftarkan namanya.

Pasal 18

1. Pimpinan Rapat berhak menentukan lamanya peserta berbicara.
2. Bila pembicara melampaui batas waktu yang ditetapkan, Pimpinan Rapat dapat memperingatkan agar ia segera mengakhiri pembicaraannya.



Pasal 19

Setiap waktu kepada peserta dapat diberikan kesempatan interupsi untuk :

1. Minta penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan.
2. Mengajukan usul prosedur tentang soal yang dibicarakan.
3. Mengajukan usul menunda Rapat untuk sementara.

Pasal 20

1. Penyimpangan dari pokok pembicaraan tidak diperkenankan.
2. Apabila seorang pembicara mempergunakan kata-kata atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan rapat maka Pimpinan Rapat dapat memberi nasehat/peringatan agar ia berbuat tertib kembali.
3. Pembicara yang tidak mengindahkan peringatan Pimpinan Rapat, oleh Pimpinan Rapat dapat diputus untuk tidak diperkenankan mengikuti terus rapat.
4. Apabila dipandang perlu Pimpinan Rapat berhak menunda rapat untuk sementara.

Pasal 21.

Untuk setiap rapat sedapat-dapatnya dibuat risalah lengkap laporan tulisan cepat dan/atau rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan dalam acara rapat.

1) Tempat dan acara rapat.
2) Hari/tanggal dan jam permulaan dan penutupan rapat.
3) Ketua dan Sekretaris Rapat.
4) Nama-nama peserta yang hadir.
5) Nama-nama pembicara dan pendapatnya.
6) Keterangan tentang keputusan/kesimpulan.

## BAB IX
## TATA CARA PEMILIHAN DEWAN KURATOR DAN DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI

Pasal 22

1. Pemilihan Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI dilakukan dengan pemilihan Formatur dengan mandat penuh.
2.

2. Formatur terdiri dari 3 (tiga) orang, masing-masing dari unsur Dewan Kurator, Direktorium Pusat LEMKARI dan Perwakilan LEMKARI Daerah Tingkat I.
3. Pemilihan Formulator dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga (2/3) dari jumlah peserta.

**Pasal 23**
Dengan terpilihnya Formatur, maka Direktorium Pusat LEMKARI yang lama dengan sendirinya menjadi demisioner.

**Pasal 24**
Formulator mengumumkan susunan Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI yang baru pada Rapat Paripurna terakhir dari Musyawarah Besar ke III LEMKARI.

## BAB X
## QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

**Pasal 25**
1. Rapat Paripurna dinyatakan syah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh dari jumlah peserta.
2. Rapat Paripurna untuk membentuk Komisi-komisi dan memilih Formulatur sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta.

**Pasal 26**
1. Tiap peserta mempunyai hak 1 (satu) suara.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak
3. Keputusan berdasarkan mufakat adalah syah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari jumlah peserta.
4. Pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah syah apabila :
   1) Diambil dalam Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta.
   2) Disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang hadir, yang memenuhi quorum.



**Pasal 27**
1. Dalam hal pungutan suara menunjukkan suara sama banyak, maka pungutan suara diulang sekali lagi.
2. Apabila hasil ulang pungutan suara tetap sama banyak, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Mubes.

**Pasal 28**
Pungutan suara tentang orang atau masalah-masalah penting dilakukan dengan rahasia atau tertulis.

**Pasal 29**
Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung, kecuali pengambilan keputusan secara rahasia.

**Pasal 30.**
Untuk menetapkan/merubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Program Umum, maka :
1) Sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta harus hadir.
2) Putusan diambil dari sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta yang hadir.

## BAB XI
## SEKRETARIAT

**Pasal 31**
1. Sekretariat Musyawarah Besar ke III LEMKARI dipimpin seorang Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Mubes III LEMKARI atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
2. Sekretariat MUBES III LEMKARI dibantu Staf Sekretariat.

## BAB XII
## KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 32**
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh MUBES III LEMKARI.

**Pasal 33**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 1986

MUSYAWARAH BESAR KE III

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMKARI
PIMPINAN
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua Sekretaris

(Ir. Prasetyo Sunarto) (Drs. Bambang Purnomo)





## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

Nomor : III/MUBES—III/LEMKARI/1986

Tentang :

JADWAL ACARA MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) TANGGAL 2 s/d 4 MEI 1986 DI JAKARTA.

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Menimbang :*

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan MUBES ke III LEMKARI untuk terselenggaranya musyawarah dan rapat-rapat dengan tertib dan lancar maka perlu ditetapkan Jadwal Acara MUBES III LEMKARI tersebut.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya satu keputusan tentang Jadwal Acara MUBES III LEMKARI.

*Mengingat :*

1. Keputusan DIRPUS LEMKARI Nomor : 313/KPTS/DP/X/85 tentang MUBES III LEMKARI
2. Keputusan MUBES ke III LEMKARI Nomor : I/MUBES—III/LEMKARI/1986 tentang Pimpinan MUBES III LEMKARI 1986.
3. Keputusan MUBES ke III LEMKARI Nomor : II/MUBES—III/LEMKARI/1986 tentang Peraturan Tata Tertib MUBES III LEMKARI.

*Memperhatikan :*

Permusyawaratan dalam MUBES III LEMKARI yang membahas rancangan Keputusan tentang Jadwal Acara MUBES ke III LEMKARI.

*Memutuskan:*

*Menetapkan* : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI.

*Pertama* : Jadwal Acara Musyawarah Besar ke III LEMKARI secara lengkap dan terinci adalah seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

*Kedua* : Jadwal Acara seperti dimaksud pada diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman didalam penyelenggaraan Musyawarah Besar ke III/LEMKARI.

*Ketiga* : Perubahan atas Jadwal Acara Musyawarah Besar ke III LEMKARI untuk penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan dapat dilakukan dengan persetujuan MUBES III LEMKARI

*Keempat* : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

*Kelima* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 1986.

MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMKARI
PIMPINAN
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

(Ir. Prasetyo Sunarto) (Drs. Bambang Purnomo)



L A M P I R A N
KEPUTUSAN MUBES III LEMKARI 1986 DI JAKARTA
NOMOR : III/MUBES III/LEMKARI/1986
TANGGAL : 2 MEI 1986

| TANGGAL | SIDANG/RAPAT | K E G I A T A N | WAKTU | P I M P I N A N |
|---|---|---|---|---|
| 2 Mei 1986 | Pembukaan | 1. Pembukaan | 19.30 | MC : Drs. Dicky Sunaryo |
| | | 2. Lagu Indonesia Raya | | Ronny H. |
| | | 3. Mengheningkan Cipta | | Dipimpin oleh DPP Golkar |
| | | 4. Gema Wahyu Illahi, SariTil Tilawah | | Hayyan & Akmal |
| | | 5. Ikrar Panca Bhakti | | Mus Arifin |
| | | 6. Mars Golkar | | Ronny H. |
| | | 7. Hymne Golkar | | Ronny H. |
| | | 8. Laporan Panitya | | Ketua Panitya |
| | | 9. Penjelasan Dirpus Lemkari | | Ketua Dirpus Lemkari |
| | | 10. Sambutan DPD Golkar Tk. I DKI. | | Ketua DPD Golkar Tk. I. |
| | | 11. Sambutan Bp. Gubernur KDH. Tingkat I DKI. | | Bp. Gubernur DKI. |
| | | 12. Pengarahan dan pembukaan Mubes oleh Bp. Ketua DPP Golongan Karya | | Bp. Pimpinan DPP Golkar |
| | | 13. Do'a | | Bp. Eddy Suparto |
| | | 14. Istirahat. | | |

| TANGGAL | SIDANG/RAPAT | K E G I A T A N | WAKTU | P I M P I N A N |
|---|---|---|---|---|
| 2 Mei '86 | Sidang Paripurna | Sidang Paripurna I dipimpin oleh Ketua Dirpus untuk menentukan Ketua dan sekretaris Sidang. Dilanjutkan dengan penyerahan palu pimpinan sidang kepada Ketua Sidang. | 22.00 s/d 22.30 | Pimpinan MUBES |
| 2 Mei '86 | | Sidang Paripurna dipimpin ketua sidang terpilih untuk menetapkan<br>1. Tata-tertib Sidang<br>2. Jadwal acara Mubes<br>Istirahat. | 22.30 s/d 23.00 | Pimpinan Mubes |
| 3 Mei '86 | Pengarahan | 1. Pengarahan Bp Menko Kesra Bp. Alamsah Ratuperwiranegara<br>2. Pengarahan Bp. Menag. Bp. Munawir Syadzali, MA<br>Istirahat .<br>3. Pengarahan Bp. Ketua Umum<br>4. Pengarahan Ketua Umum MDI | 09.00 s/d 10.30<br><br>10.30 s/d 12.00<br><br>12.00 s/d 14.00<br>14.00 s/d 16.00 | Pimpinan Mubes<br><br>Pimpinan Mubes<br><br>Pimpinan Mubes<br>Pimpinan Mubes |
| 3 Mei '86 | Sidang Paripurna | Pertanggungan jawab Dirpus Lemkari periode 1981–1986<br>Pandangan Umum | 16.30 s/d 18.00<br>19.00 s/d 20.00<br>20.15 s/d selesai | Pimpinan Mubes<br>Pimpinan Mubes<br>Pimpinan Mubes |



| TANGGA | SIDANG/RAPAT | K E G I A T A N | WAKTU | P I M P I N A N |
|---|---|---|---|---|
| 4 Mei '86 | Sidang Paripurna | Menentukan pimpinan Sidang Komisi | 07.30 s/d 08.00 | Pimpinan Mubes |
| 4 Mei '86 | Sidang Komisi | A. AD/ART<br>B ORGANISASI<br>C. PROGRAM | 08.15 s/d 10.00 | Pimpinan Komisi |
| 4 Mei '86 | Sidang Paripurna | Sidang Paripurna dengan isi laporan sidang komisi dan pembentukan formatur. | 10.15 s/d 11.15 | Pimpinan Mubes |
| 4 Mei '86 | Sidang Paripurna | Pembacaan hasil formatur & penutupan | 12.30 s/d 13.00 | Pimpinan Mubes |
| 4 Mei '86 | Ramah Tamah | | 13.00 s/d selesai | Panitia Pelaksana |

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Mei 1986

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

K e t u a,

( Ir. PRASETYO SUNARYO )

MUSYAWARAH BESAR KE III
P I M P I N A N
LEMKARI
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

S e k r e t a r i s,

( Drs. BAMBANG PURNOMO )

## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

Nomor : IV/MUBES III/LEMKARI/1986
Tentang :
PEMBENTUKKAN KOMISI-KOMISI
DALAM MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

*Bismillahirrohmanirrohiem*
*MUSYAWARAH BESAR KE III*
*LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( LEMKARI )*

*Menimbang :*

1. Bahwa Musyawarah Besar ke III LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, perlu mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi untuk merumuskan dan menggariskan keputusan-keputusan yang menjadi cita-cita, keinginan dan kehendak warga, masyarakat maupun pemerintah didalam mensukseskan pembangunan bangsa menuju cita-cita bersama.
2. Bahwa untuk kelancaran serta ketertiban dalam permusyawaratan dan dapat tercapainya pengambilan keputusan-keputusan dengan sempurna atas masalah-masalah yang diperbincangkan dalam MUBES ke III ini sesuai dengan lingkup permasalahan yang ada.
3. Bahwa oleh karena itu perlu adanya satu keputusan tentang pembentukkan Komisi-komisi MUBES III LEMKARI.

*Mengingat :*

1. Anggaran Dasar LEMKARI Bab VIII pasal 19 dan Bab IX Pasal 21.



*Memperhatikan :*

1. Pembicaraan yang diadakan dalam rapat-rapat persiapan MUBES yang diadakan khusus membahas hal tersebut.
2. Permusyawaratan dalam MUBES yang membahas mengenai pembentukan Komisi-komisi dalam MUBES III LEMKARI 1986 ini.

*Memutuskan :* MENETAPKAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUBES III LEMKARI.

*Pertama* : Membentuk Komisi-komisi MUBES III LEMKARI masing-masing sebagai berikut :

KOMISI I : Komisi yang membahas tentang perubahan/penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI yang baru dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.

KOMISI II : Komisi yang membahas mengenai Organisasi dalam berbagai aspeknya serta merumuskan Rancangan-Rancangan Keputusan MUBES III.

KOMISI III : Komisi yang membahas mengenai Program Umum Organisasi dan pernyataan garis kebijaksanaan Organisasi saat ini.

*Kedua* : Tugas Komisi-komisi yang dimaksud pada diktum pada diktum pertama keputusan ini adalah memusyawarahkan dan mengambil keputusan atas

masalah yang menjadi acara rapat Komisi sesuai dengan lingkup permasalahan masing-masing Komisi.

*Ketiga* : Jumlah masing-masing anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna MUBES III LEMKARI yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta.

*Keempat* : Pimpinan Komisi-komisi yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi yang bersangkutan.

*Kelima* : Hasil musyawarah Komisi-komisi dilaporkan pada Rapat Paripurna MUBES III LEMKARI.

*Keenam* : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 1986

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
( LEMKARI )

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMKARI
PIMPINAN,
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

( Ir. Prasetyo Sunaryo ) ( Drs. Bambang Purnomo )





## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

Nomor : V/MUBES-III/LEMKARI/1986
Tentang :
PERTANGGUNGAN JAWAB DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI MASA BAKTI 1981 - 1986

*Bismillahirrohmanirrohiem*

## MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

*Menimbang* :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Organisasi, Direktorium Pusat LEMKARI dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar serta berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Besar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Bahwa karena itu Direktorium Pusat LEMKARI yang bersifat kolektif, sebagai mandataris Musyawarah Besar, tunduk dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Besar LEMKARI.
3. Bahwa Direktorium Pusat LEMKARI masa bakti 1981)1986 telah memberikan laporan pertanggung jawaban dalam Rapat Paripurna ke III MUBES III LEMKARI tanggal 3 Mei 1986 di Jakarta.
4. Bahwa Musyawarah Besar III LEMKARI memandang perlu menanggapi, menilai dan mengambil keputusan terhadap laporan pertanggung jawaban Direktorium Pusat LEMKARI tersebut.

*Mengingat* :

1. Anggaran Dasar LEMKARI Bab VII pasal 18.

2. Keputusan MUBES II LEMKARI tahun 1981 di Jakarta.
3. Keputusan MUBES III LEMKARI No. : II/ MUBES-III/LEMKARI Tentang Peraturan Tata Tertib MUBES III LEMKARI.

*Memperhatikan :*

Permusyawaratan dalam Musyawarah Besar III LEMKARI yang membahas pertanggung jawaban Direktorium Pusat LEMKARI masa bakti 1981-'86

*Memutuskan :*

*Menetapkan :* Keputusan Musyawarah Besar III LEMKARI tentang : Pertanggung jawaban DIRPUS LEMKARI masa bakti 1981 — 1986.

*Pertama* : Menerima dan mengesahkan Pertanggung Jawaban DIRPUS LEMKARI masa bakti 1981-1986 yang disampaikan oleh Ketua Umum DIRPUS LEMKARI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna MUBES LEMKARI tanggal 3 Mei 1986 di Jakarta.

*Kedua* : Materi pertanggung jawaban DIRPUS LEMKARI seperti dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



*Ketiga* : Materi pertanggung jawaban DIRPUS LEMKARI seperti dimaksud pada diktum kedua keputusan ini selanjutnya dijadikan pertimbangan dan referensi bagi DIRPUS periode berikutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

*Keempat* : Apabila ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

*Kelima* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Mei 1986

MUSYAWARAH BESAR KE III

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMKARI
PIMPINAN :
Lembaga Karyawan Dakwah Islam
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

**( Ir. Prasetyo Sunaryo )** **( Drs. Bambang Purnomo )**

**LAMPIRAN**
**KEPUTUSAN MUBES III LEMKARI 1986 DI JAKARTA**
**NOMOR : V/MUBES--III/LEMKARI/1986**
**TANGGAL : 4 MEI 1986**
**PERTANGGUNG- JAWAB DIRPUS LEMKARI**
**MASA--BAKTI 1981 -- 1986.**

*"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM"*

## I. PENDAHULUAN/PENGANTAR.

1. Berdasarkan Anggaran Dasar LEMKARI Bab VII Pasal .. ayat 2 disebutkan bahwa Dir-Pus LEMKARI bertanggung-jawab atas pengurusan dan pengaturan kegiatan organisasi keluar maupun kedalam berdasarkan Anggaran Dasar dan segala keputusan yang diambil oleh Musyawarah Besar.
2. Kegiatan organisasi keluar dan kedalam tatalaksananya diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Program Umum yang keduanya merupakan hasil Keputusan Musyawarah Besar LEMKARI yang penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Dasar Bab VIII Pasal 19 ayat 1.
3. Musyawarah Besar LEMKARI merupakan forum musyawarah tertinggi untuk menetapkan jadwal kegiatan organisasi yang ditargetkan untuk periode waktu 5 tahun yang dianggap optimal masa realisasinya dengan pertanggungan jawab pada akhir periode.
4. Musyawarah Besar LEMKARI menentukan personalia kepengurusan Dir-Pus LEMKARI yang dipercaya kesanggupan dan kemampuannya untuk merealisir dan menjabarkan segenap kegiatan organisasi yang dijadwalkan.
5. Akhir masa periode 5 tahun dalam forum Musyawarah Besar di dalam mengakhiri masa bakti kepengurusannya, Dir-Pus LEMKARI mempertanggung jawabkan realisasi kegiatan organisasi yang dibebankan kepadanya.



## II. U M U M.

1. Bahwasannya organisasi LEMKARI dalam berperan sebagai lembaga dakwah keagamaan sekaligus juga berperan sebagai lembaga pendidikan kemasyarakatan memerlukan suatu sistim dakwah yang terarah, terpadu dan menyeluruh,
2. Bahwasannya organisasi LEMKARI dalam mempolakan suatu sistim dakwah yang terarah, terpadu dan menyeluruh harus memiliki aparatur organisasi yang terlatih, berdedikasi dan militan,
3. Bahwasannya sistim dakwah yang terarah, terpadu dan menyeluruh memerlukan suatu perencanaan program dan latihan yang menjangkau hajat massa banyak,
4. Bahwasannya perencanaan program dan latihan yang dapat menjangkau hajat massa banyak tersebut harus mendapatkan legitimasi dan memerlukan suatu team-work kemasyarakatan, maka :
5. Laporan pertanggungan-jawab DIR--PUS LEMKARI dalam masa bakti kepengurusan tahun 1981 s/d 1986 meliputi :
   (A) Bidang konsolidasi organisasi.
   (B) Bidang pengembangan dakwah dan persepsi masyarakat.
   (C) Bidang legitimasi dan kerja sama antar organisasi.

## III. ISI LAPORAN/PERTANGGUNGAN JAWAB.

**(A). Bidang konsolidasi organisasi**

1. Kegiatan yang menyangkut konsolidasi organisasi dititikberatkan kepada penyebaran pembentukan aparatur organisasi mulai dari Perwakilan di tingkat Propinsi, Senat di tingkat Kabupaten/Kotamadya, Komisariat ditingkat Kecamatan sampai Study-Group di tingkat Desa
2. Sampai saat sekarang ini diseluruh penjuru tanah air sudah terbentuk 19 Perwakilan di tingkat Propinsi meliputi Dati I : Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara Bali, Sulawesi Utara, Riau dan Kalimantan Barat.

3. Dalam pengisian personalia kepengurusan di sana sini dirasakan adanya kekurangan tenaga yang capable dan acceptable, sehingga diperlukan adanya kaderisasi dan recruiting kepengurusan.
4. Kaderisasi dan recruiting serta apgrading kepengurusan sudah direncanakan matang dalam penataran umum yang menyeluruh, namun karena koordinasi sampai saat ini baru dilaksanakan di Jawa Timur.

   Mengingat besarnya urgensi positive interbreed dari pelaksanaan penataran umum ini diharapkan mendapat prioritas penanganan bagi pengurus Dirpus LEMKARI masa mendatang.

**(B). Bidang pengembangan dakwah dan persepsi masyarakat.**

1. *Visi* dan *strategi* dakwah LEMKARI bertumpu pada sistem dakwah yang dipolakan secara terarah, terpadu dan menyeluruh : Dengan *sistem dakwah yang terarah* dimaksudkan agar mampu mempersiapkan peserta-peserta didik untuk hidup layak sebagai manusia dalam kurun zamannya dengan serba macam peluang, tantangan dan hambatan yang dihadapinya.

   Dengan *sistem dakwah terpadu* dimaksudkan agar dalam pembinaan peserta-peserta didik, berbagai bakat dan kemampuan yang ada pada peserta didik dapat dikembangkan secara berimbang sehingga berbagai peluang dalam kehidupan dapat digarap bersama-sama dalam kesatuan tindak yang tertata demi kepentingan seluruh masyarakat.

   Dengan *sistem dakwah menyeluruh* dimaksudkan agar dalam kawasan hidup suatu bangsa, segala usaha yang harus ditangani untuk kelestarian hidup bangsa sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam dapat ditanggulangi oleh seluruh warga bangsa dalam kebersamaan.

   Visi dan strategi dakwah yang dipolakan terarah, terpadu dan menyeluruh adalah yang diidealkan dalam GBHN.
2. Melihat luasnya ruang lingkup serta komitment-nya bermacam aspek yang terdapat dalam sistim dakwah yang dipolakan terarah, terpadu dan menyeluruh tersebut, maka bagi organisasi LEMKARI dengan menyesuaikan potensi dan peluang yang dimilikinya maka pola idealisme dakwah tersebut dituangkan dalam Program Umum dan Program Terurai dengan pelaksanaan yang optimal.
3. Bagi organisasi LEMKARI dengan bertolak dari potensi dan peluang yang dimiliki masih menitik beratkan kegiatannya sebagai lembaga dakwah keagamaan, melaksanakan amar makruf nahi munkar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta falsafah Pancasila dalam bentuk pengajian dan ceramah keagamaan.
4. Pengajian dan ceramah keagamaan yang secara routine dan kontinue diselenggarakan di dalam setiap study-group LEMKARI mendapatkan respons yang cukup memuaskan dari masyarakata, khususnya dari para remaja/generasi muda, terbukti dari meluapnya peserta-peserta didik dalam setiap study-group di seluruh penjuru tanah air. Namun di beberapa tempat masih dirasakan adanya challange/tantangan atau hambatan.
5. Tantangan ataupun hambatan yang timbul disebabkan masih terdapatnya salah informasi/mis-information ataupun salah pengertian/mis-understanding, yang diserap oleh sebagaian kecil anggota masyarakat terhadap misi LEMKARI dengan segala implementasi pembinaan umatnya dan setelah oleh pengurus LEMKARI maupun warga LEMKARI sendiri diberikan penjelasan dan diadakan pendekatan hampir seluruh hambatan di segenap penjuru tanah air dapat diatasi.
6. Dalam pengamatan di lapangan respons dari persepsi masyarakat terhadap pengajian dan ceramah keagamaan yang diusahakan oleh LEMKARI cukup memuaskan, adalah disebabkan dari motivasi dan argumentasi yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan respons dari masyarakat ini akan lebih memuaskan apabila kita mampu menjabarkan hikmah dari motivasi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tersebut.

(C). **Legitimasi dan kerjasama antar organisasi.**

1. Organisasi LEMKARI sebagai lembaga dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan telah mendapatkan legitimasi sebagai organisasi komponen Golongan Karya mulai dari Pusat sampai di daerah-daerah. Karena itulah maka seluruh pembentukan aparatur organisasi LEMKARI selalu dikonsultasikan dengan aparatur Golongan Karya untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dan dapat terbentuk teemwork yang baik dengan seluruh jajaran organisasi komponen Golongan Karya.
2. Dalam pelaksanaan di lapangan, pembentukan aparatur LEMKARI umumnya berjalan menurut hirrchi dan koordinasi yang cukup baik karena adanya legitimasi sebagai komponen Golongan Karya dan pendekatan pribadi (personal-approach) yang baik dari formatur LEMKARI dan yang terutama adalah karena "nasrun-minalloh", walaupun di beberapa tempat masih terdapat hambatan. Namun dalam menghadpi hambatan terhadap pembentukan aparatur Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI), alhamdu lillah pembinaan umat serta peserta-peserta-didik dapat tetap berlangsung dengan baik, sehingga berpotensi sebagai embriyo unit organisasi LEMKARI.
3. Kerjasama antar organisasi khususnya dengan organisasi komponen Golongan Karya cukup baik, terbukti bahwa warga LEMKARI di banyak daerah dipercayakan menjadi anggota pengurus M.D.I., ditetapkan menjadi kader-kader Golkar (Karakterdes) dan diberi tugas membina pengajian oleh organisasi-organisasi lain.
   Hal ini dimungkinkan semua karenanya adanya jiwa berdedikasi dan kemampuan profesi yang dimiliki oleh warga LEMKARI.

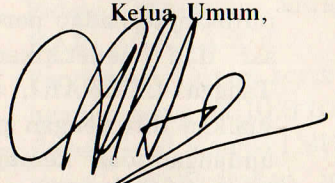


Demikianlah qualitative-progerss-report yang mampu kami susun untuk kita sajikan sebagai pertanggung jawab Dirpus LEMKARI masa bakti kepengurusan tahun 1981 s/d 1986 di dalam Mubes LEMKARI yang ke-III dengan suatu catatan dan harapan :

1. rela dan terbuka untuk menerima kritik positif sebagai suatu pengalaman yang dapat menjadi pelajaran untuk perbaikan di masa depan.
2. sebagai kumpulan insan yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan secara individu maupun dalam kelompok kepengurusan Dirpus LEMKARI masa bakti tahun 1981-1986 mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau keterlanjuran tutur kata dan perbuatan.

**ALHAMDU LILLAH JAZAKUMULLAHU KHOIRA**
**WABILLAHIT–TAUFIQU WAL–HIDAYAH**
**WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH**
**DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI**

Ketua Umum,



( R. H. EDDY MASIADI ).

## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

*Nomor : VI/MUBES—III/LEMKARI/1986*

*Tentang*

*ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)*

**Menimbang** :

1. Bahwa Musyawarah Besar ke III LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, mempunyai tugas dan wewenang untuk merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI.
2. Bahwa Musyawarah Besar ke III LEMKARI memandang perlu untuk mengambil keputusan terhadap perubahan Anggaran Dasar dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI, agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perundang-undangan dan kemajuan yang terjadi sebagai hasil pembangunan yang sedang berlangsung.
3. Bahwa perkembangan dan kemajuan yang dicapai LEMKARI diseluruh Indonesia memerlukan adanya penyesuaian dan perubahan-perubahan, sehingga aktif LEMKARI dalam pembangunan bangsa dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
4. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga yang baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kemajuan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat.



5. Bahwa oleh karena itu perlu adanya satu keputusan penetapan Anggaran Dasar baru dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI.

**Mengingat** :

1. Keputusan MUNAS III GOLKAR 1981 di Jakarta.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 mengenai keormasan.
3. Keputusan MUBES III LEMKARI Nomor : II/MUBES—III/LEMKARI/1986 tentang Tata Tertib MUBES III LEMKARI 1986.

**Memperhatikan** :

1. Pidato Pengarahan : Bapak Ketua Umum DPP GOLKAR
2. Pidato Pengarahan : Bapak MENKO KESRA R.I.
3. Pidato Pengarahan : Bapak Menteri AGAMA R.I.
4. Pidato Pengarahan :Bapak KETUA D.P.P. M.D.I.
5. Pidato Pertanggung Jawaban DIRPUS LEMKARI AGAMA R.I.
6. Pandangan Umum serta usul dan saran seluruh peserta MUBES III.
7. Rapat-rapat Komisi I MUBES III LEMKARI yang membicarakan masalah perubahan Anggaran Dasar dan penetapan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI.

**Memutuskan** :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMKARI.

**Pertama** : Merubah/menyempurnakan Anggaran Dasar LEMKARI lama yang disyahkan pada MUBES II LEMKARI 1981 di Jakarta.

**Kedua** : Menetapkan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI.

**Ketiga** : Perubahan/penyempurnaan serta penetapan seperti dimaksudkan dalam diktum pertama dan kedua Surat Keputusan ini tercantum dalam lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**Keempat** : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan ditetapkan tersendiri oleh Direktorium Pusat LEMKARI DENGAN PERSETUJUAN Dewan Kurator LEMKARI.

**Kelima** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Mei 1986.

MUSYAWARAH BESAR LEMKARI KE III

MUSYAWARAH BESAR KE III
PIMPINAN,
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

( Ir. Prasetyo Sunaryo ) ( Drs. Bambang Purnomo )





**LAMPIRAN**
**KEPUTUSAN MUBES III LEMKARI 1986 DI JAKARTA**
**NOMOR : VI/MUBES III/LEMKARI/1986**
**TANGGAL : 4 MEI 1986.**

# ANGGARAN DASAR
# LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
# ( L E M K A R I )

**M O T T O :**

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة ال عمران ١٠٤

**Artinya :**
*" Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian ummat (golongan) yang menyeruh kepada yang baik dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar (amar ma'ruf nahi munkar) dan yang demikian itulah orang yang beruntung.* Surat Ali 'Imron ayat 104 :

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سورة يوسف ١٠٨

**Artinya :**
*" (Wahai Muhammad) katakanlah (kepada ummatmu) : (Qur-an) inilah jalanku. Aku menyeru kepada jalan Alloh dengan saling mengetahui sendiri (dalil—dalilnya) aku bersama pengikutku ; dan Maha Suci Alloh dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik".*
Surat Yusuf ayat 108 :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

سورة النحل : ١٢٥

**Surat An Nahl ayat 125 :**
**Artinya :**
*"Menyerulah (engkau Muhammad) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan bantahlah (berilah hujjah) mereka dengan yang baik.*

## MUKADIMAH

Dengan rahmat Alloh yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, menyadari sepenuhnya :

Bahasanya didalam kelanjutan perjuangan Orde Baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara kita, mutlak dibutuhkan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat Indonesia. Maka tanpa mengurangi peranan golongan lain, ummat Islam Indonesia berkewajiban sepenuhnya untuk menyumbangkan amal jariyah dan amal sholihnya di dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, spirituil maupun materiil, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Penekanan dari amal jariyah serta amal sholeh ummat Islam Indonesia adalah berupa karya non politik dan karya yang semata-mata ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum untuk meningkatkan budi pekerti luhur dan taraf hidup rakyat
3. Untuk lebih menertibkan dan menghidupkan amal jariyah dan amal Sholeh tersebut, dalam rangka menunjang dan melangsungkan program pemerintah dalam masa Pelita yang berorientasi pada Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam GBHN, dirasakan perlu adanya suatu lembaga karyawan dakwah Islam yang non politik dan



hanya merupakan wadah yang profesional, maka dengan ini disusunlah Anggaran Dasar LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) sebagai berikut :

## BAB I
## NAMA, WAKTU, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1
Yayasan ini bernama : LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM disingkat "LEMKARI".

### Pasal 2
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini didirikan tanggal 3 Januari 1972 untuk waktu yang tak terbatas.

### Pasal 3
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini berpusat di Jakarta dan dapat membentuk Perwakilan di seluruh Indonesia.

## BAB II
## ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 4
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM berasaskan Pancasila.

### Pasal 5
Tujuan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini ialah memberikan peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam turut serta membangun manusia Indonesia seutuhnya di dalam tata susunan masyarakat Pancasila yang 'adil dan makmur jasmaniah maupun rohaniah.

### Pasal 6
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini berfungsi sebagai wadah dan sarana bagi para Da'i/Mubaligh dan Muballighah didalam mengkaji dan melaksanakan karya dakwahnya untuk menyampaikan dan menyebarluaskan Agama Islam sebagai rahmat untuk seluruh 'alam

## BAB III
## SIFAT DAN SISTIM

### Pasal 7

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini bersifat sebagai lembaga pendidikan dakwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas dan terpadu, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang berdasarkan atas keselarasan dan keseimbangan dunia dan akhirat.

### Pasal 8

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini merupakan lembaga pendidikan non formal dengan menyajikan 'ilmu keagamaan dan pengetahuan pembangunan yang dititik-beratkan kepada amaliah/karya dan kekaryaan, untuk memenuhi hajat massa dalam proses pembangunan masyarakat.

## BAB IV
## USAHA DAN KEGIATAN

### Pasal 9

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM bertugas pokok melaksanakan dakwah Agama Islam dengan berpedoman kepada kitab suci Al Qur-an dan Sunnah Rasul dengan segenap aspek pengembangan kesejahteraannya agar penghayatan beragama dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Alloh Subhanahu wa Ta'ala.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok yang disebut diatas, LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini mengadakan usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang :



*PENDIDIKAN KEAGAMAAN :*

a. Mengadakan peningkatan pendidikan agama di pondok-pondok pesantren, mesjid-mesjid dan surau-surau dalam rangka mempertinggi budi pekerti luhur serta mewujudkan toleransi ummat beragama.
b. Menyelenggarakan pengajian-pengajian agama di mesjid mesjid, surau-surau dan instansi-instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga-Lembaga serta dalam lingkungan keluarga yang menghendakinya.
c. Menyelenggarakan ceramah-ceramah keagamaan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
d. Mengadakan perpustakaan untuk mempertinggi mutu pengetahuan.

*PENDIDIKAN/PENGETAHUAN PEMBANGUNAN. :*

a. Mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi karyawan-karyawan dakwah.
b. Menyelenggarakan pelajaran-pelajaran pengetahuan umum di pondok-pondok pesantren.
c. Menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran ber-Bangsa dan ber-Negara.
d. Menyelenggarakan pelajaran-pelajaran kejuruan yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat.
e. Menyelenggarakan latihan-latihan kerja dalam bidang pembangunan masyarakat.

*PARTISIPASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT :*

a. Mengadakan kegiatan amal sosial di masyarakat
b. Turut meningkatkan pendaya-gunaan potensi desa/masyarakat dalam proses pembangunan Nasional.

*PENDIDIKAN JASMANI DAN PEMBINAAN GENERASI* MUDA :

a. Mengadakan peningkatan usaha dalam bidang pembinaan kesegaran rohani dan jasmani, khususnya bagi generasi muda dan putus sekolah.
b. Mengadakan pembinaan/pengarahan generasi muda.
c. Mengatasi problem dikalangan generasi muda.

## BAB V

## KEANGGOTAAN

### Pasal 11

1. Keanggotaan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM sifatnya suka rela dan tidak mengikat serta terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Yang disebut anggota LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM adalah orang-orang yang bersedia mengikuti kegiatan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program serta seluruh keputusan hasil-hasil musyawarah.

### Pasal 12

Setiap anggota LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM berhak untuk mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM.



## BAB VI

## STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 13

Aparatur LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM terdiri dari :

1. Dewan Kurator dan Direktorium di Tingkat Pusat.
2. Perwakilan di Daerah Tingkat I (Propinsi).
3. Senat di Daerah Tingkat II (Kabupaten/ btamadya).
4. Komisariat di Tingkat Kecamatan dan
5. Study Group (Kelompok Belajar) sebagai unit terkecil.

### Pasal 14

Struktur ini dapat ditambah atau dikurangi menurut keadaan setempat.

### Pasal 15

Dewan Kurator dan Direktorium ditunjuk dan dipilih oleh Musyawarah Besar, Perwakilan Tingkat I dipilih oleh Musyawarah Daerah Tingkat I dan disahkan oleh Direktorium, Senat dipilih dalam Musyawarah Daerah Tingkat II dan diserahkan oleh Perwakilan, Komisariat dan Study Group ditunjuk oleh Senat.

## BAB VII

## KEPENGURUSAN

### Pasal 16

### Pasal 16

Anggota pimpinan/pengurus terdiri dari Anggota LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM dengan persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 17

Priode kepengurusan berlaku selama 5 (lima) tahun.

## BAB VIII
## TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

### Pasal 18

1. Dewan Kurator memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Direktorium dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM.
2. Direktorium Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua Sekretaris Jendral, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan serta bertanggung-jawab atas pengurusan dan pengaturan kegiatan organisasi ke luar maupun ke dalam berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan segala keputusan yang diambil oleh Musyawarah Besar.
3. Perwakilan Daerah Tingkat I bertugas melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga baik yang dibebankan oleh Direktorium Pusat maupun hasil-hasil keputusan Musyawarah Perwakilan Daerah Tingkat I.
4. Senat bertugas melaksanakan Program dan Anggaran Dasar, baik yang dibebankan oleh Perwakilan maupun hasil-hasil dari keputusan Musyawarah Senat Daerah Tingkat II.
5. Komisariat dan Study Group melaksanakan program dan Anggaran Dasar yang dibebankan oleh Senat.

## BAB IX
## MUSYAWARAH DAN RAPAT



### Pasal 19

Musyawarah dan rapat LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM terdiri dari :

1. Musyawarah Besar, diselenggarakan sedikitnya 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh segenap Dewan Kurator, Direktorium beserta segenap Stafnya, utusan Perwakilan Daerah Tingkat I dan Senat Daerah Tingkat II.
2. Musyawarah Daerah Tingkat I, diselenggarakan sedikitnya lima (5) tahun sekali, dihadiri oleh seluruh Pimpinan Perwakilan Daerah Tingkat I, Utusan Direktorium Pusat dan Utusan Senat di daerahnya.
3. Musyawarah Daerah Tingkat II, diselenggarakan sedikitnya lima (5) tahun sekali, dihadiri oleh seluruh Pimpinan Senat, Pimpinan Daerah Tingkat II, Utusan Perwakilan Tingkat I, Utusan Komisariat dan Pimpinan Study Group.

### Pasal 20

Rapat-rapat Direktorium, Perwakilan Daerah Tingkat I dan Senat diselenggarakan sedikitnya satu (1) tahun sekali.

## BAB X
## PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 21

Musyawarah/Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari satuperdua (½) yang wajib hadir. Keputusan diambil atas dasar mufakat ; apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak dari yang hadir.

## BAB XI
## KEUANGAN DAN KEKAYAAN

### Pasal 22

Kekayaan organisasi terdiri dan diperoleh dari :

a. Modal Pertama pada waktu mendirikan organisasi

b. Wasiat-wasiat, sokongan-sokongan/sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, organisasi sosial maupun Pemerintah.
c. Derma-Derma yang sifatnya tetap/tidak tetap dan tidak mengikat.
d. Dana-Dana yang diperoleh dari usaha tersebut dalam pasal sepuluh (10).
e. Usaha-Usaha lain yang sah dan diridhoi Alloh Subhanahu wa Ta'ala.

## BAB XII
## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/PEMBUBARAN

### Pasal 23

Setiap perubahan yang diadakan dalam Anggaran Dasar LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini hanya dianggap sah bilamana mendapat persetujuan dua-pertiga (2/3) suara dari Musyawarah Besar.

### Pasal 24

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM dapat dibubarkan bilamana ternyata bahwa LEMKARI tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan usahanya.

### Pasal 25

Keputusan untuk membubarkan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini dianggap sah bilamana mendapat persetujuan dari paling sedikitnya dua-pertiga (2/3) suara dalam Musyawarah Besar yang diadakan khusus untuk maksud tersebut.



### Pasal 26

Jika LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini dibubarkan maka dengan mengindahkan hukum Islam, Dewan Kurator beserta Team Likwidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan/membereskan semua hutang piutang LEMKARI dan mengawasi serta menyalurkan sisa kekayaan LEMKARI sesuai dengan yang disebut dalam "Asas", "Tujuan" dan "Usaha" dalam Anggaran Dasar ini.

## BAB XIII
## ATURAN TAMBAHAN

### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Direktorium pada persetujuan Dewan Kurator sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## ANGGARAN RUMAH TANGGA
## LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM

### BAB I
### KEANGGOTAAN

( Cukup jelas dalam Anggaran Dasar )

### BAB II
### SUSUNAN DAN WEWENANG PIMPINAN ORGANISASI

**Pasal 1**

Dewan Kurator berjumlah 5 (lima) orang merupakan Pimpinan kolektif.

**Pasal 2**

Susunan Direktorium Pusat adalah sebagai berikut :

a. Ketua Umum.
b. Ketua -- Ketua.
c. Sekretaris Jenderal.
d. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
e. Bendahara Umum.
d. Wakil-wakil Bendahara.
e. Ketua-ketua Bidang.

**Pasal 3**

Susunan Perwakilan di Daerah Tingkat I (Propinsi) sebagai berikut :

a. Ketua
b. Wakil-wakil Ketua
c. Sekretaris.
d. Wakil-wakil Sekretaris.
e. Bendahara.
f. Wakil-wakil Bendahara
g. Ketua-ketua Biro.

**Pasal 4**

Susunan Senat Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut :

a. Ketua.
b. Wakil-wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil-wakil Sekretaris.



e. Bendahara.
f. Wakil-wakil Bendahara.
g. Ketua-ketua Bagian.

**Pasal 5**

Susunan Komisariat di Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Ketua.
b. Wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil Sekretaris.
e. Bendahara.
f. Wakil Bendahara.
g. Ketua-ketua Seksi.

**Pasal 6**

Susunan Studi Grup di Tingkat Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

a. Ketua.
b. Wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil Sekretaris.
e. Bendahara.
f. Wakil Bendahara.
g. Kepala-kepala Urusan.

**Pasal 7**

Dewan Kurator memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Direktorium dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Karyawan Dakwah Islam.

**Pasal 8**

(1) Perwakilan di Daerah Tingkat I (Propinsi) berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan di Daerah Tingkat I sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa, Keputusan-keputusan dan Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat serta Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah

Tingkat I.

(2) Dalam menjalankan kebijaksanaan umum Perwakilan Daerah Tingkat I merupakan Badan Pelaksana yang bersifat kolektif.

(3) Perwakilan Daerah Tingkat I berkewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Daerah Tingkat I.

**Pasal 9.**

(1) Senat Daerah Tingkat II berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban di Daerah Tingkat II sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa, Keputusan-keputusan/Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat dan daerah Tingkat I, Keputusan Musyawarah Daerah Tingkat I dan II.

(2) Dalam menjalankan kebijaksanaan umum Senat Daerah Tingkat II merupakan Badan Pelaksana yang bersifat kolektif.

(3) Senat Daerah Tingkat II berkewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Tingkat II.

**Pasal 10**

(1) Komisaris Tingkat Kecamatan berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan di Komisariat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa, Keputusan-keputusan/Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Komisariat.

(2) Dalam menjalankan kebijaksanaan umum Pimpinan Komisariat merupakan Badan Pelaksana yang bersifat kolektip.

(3) Pimpinan Komisariat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Komisariat.

**Pasal 11**

(1) Rapat Pimpinan Studi Grup berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan Studi Grup sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Besar,



Musyawarah Besar Luar Biasa, Keputusan-keputusan/Peraturan-peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Studi Grup.

(2) Dalam menjalankan kebijaksanaan Pimpinan Studi Grup bersifat kolektif.

(3) Pimpinan Studi Grup berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pada Rapat Anggota Studi Grup.

**Pasal 12**

(1) Pengisian lowongan antar waktu Personalia Direktorium Pusat dilakukan oleh Direktorium Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Kurator dan kemudian dilaporkan pada rapat pimpinan dalam waktu terdekat.

(2) Pengisian lowongan antar waktu Personalia Perwakilan Daerah Tingkat I dan Senat Daerah Tingkat II, dilakukan masing-masing oleh Direktorium Pusat dan Perwakilan Daerah Tingkat I yang bersangkutan atas usul dan saran dari Perwakilan Daerah Tingkat I dan Senat Tingkat II yang berkepentingan.

(3) Pengisian lowongan antar waktu Personalia Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Studi Grup dilakukan masing-masing oleh Senat Tingkat II dan Komisariat yang bersangkutan atas usul Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Studi Grup yang bersangkutan.

**Pasal 13**

(4) Masa jabatan antar waktu berakhir pada waktu masa jabatan yang digantikannya telah habis.

## BAB III
## PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT- RAPAT

**Pasal 14**

(1) Musyawarah Besar dihadiri oleh peserta sebagai berikut :

a. Dewan Kurator
b. Direktorium Pusat
c. Perwakilan Daerah Tingkat I
d. Senat Daerah Tingkat II

(2) Peserta Musyawarah Besar Luar Biasa sama seperti yang diatur pada ayat (1) pasal 14.

(3) Pimpinan Musyawarah Besar dipilih oleh dan dari peserta.
(4) Sebelum terpilihnya Pimpinan Musyawarah Besar, Direktorium Pusat bertindak sebagai Pimpinan sementara.

**Pasal 15**

(1) Musyawarah Perwakilan Daerah Tingkat I dihadiri oleh :
   a. Unsur Direktorium Pusat.
   b. Perwakilan Daerah Tingkat I.
   c. Unsur Senat Daerah Tingkat II.
(2) Pimpinan Musyawarah Daerah Tingkat I dipilih oleh dan dari peserta.
(3) Sebelum terpilih Pimpinan Musyawarah Daerah Tingkat I, bertindak sebagai pimpinan sementara.

**Pasal 16**

(1) Musyawarah Daerah Tingkat II dihadiri oleh :
   a. Utusan Pimpinan Perwakilan Daerah Tingkat I.
   b. Senat Daerah Tingkat II.
   c. Pimpinan Komisariat.
(2) Pimpinan Musyawarah Daerah Tingkat II dipilih oleh dan dari peserta.
(3) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Tingkat II terpilih, Senat Daerah Tingkat II bertindak sebagai pimpinan sementara

**Pasal 17**

(1) Musyawarah Komisariat dihadiri oleh :
   a. Utusan Senat Daerah Tingkat II.
   b. Pimpinan Komisariat.
   c. Pimpinan Studi Grup.
(2) Pimpinan Musyawarah Komisariat dipilih oleh dan dari peserta
(3) Sebelum Pimpinan Musyawarah terpilih, Pimpinan Komisariat bertindak sebagai pimpinan sementara.

**Pasal 18**

(1) Musyawarah Anggauta dihadiri oleh :
   a. Utusan Pimpinan Komisariat.
   b. Anggauta-Anggauta Studi Grup—Studi Grup.
(2) Pimpinan Musyawarah Studi Grup dipilih oleh dan dari peserta
(3) Sebelum Pimpinan Musyawarah terpilih, Pimpinan Studi Group bertindak sebagai pimpinan sementara.



**Pasal 19**

Ketentuan mengenai peserta Musyawarah dan rapat-rapat ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

## BAB IV
## HAK BERBICARA DAN HAK SUARA

**Pasal 20**

Hak berbicara dan hak suara peserta Musyawarah dan rapat-rapat adalah sebagai berikut :
a. Hak berbicara pada dasarnya menjadi hak perorangan.
b. Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh peserta yang penggunaannya dilakukan melalui sistim perwakilan.

## BAB V
## KEUANGAN ORGANISASI

**Pasal 21**

1. Keuangan Organisasi diperoleh dari uang sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
2. Besarnya uang sumbangan ditentukan oleh besarnya keperluan dan penyalurannya diatur pada peraturan Organisasi.
3. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi wajib dipertanggung jawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam peraturan Organisasi
4. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah Besar/Musyawarah Daerah semua pemasukan dan pengeluaran harus dipertanggung-jawabkan kepada Direktorium Pusat/Perwakilan Tingkat I/Senat Tingkat II/Komisaris/Studi Grup yang bersangkutan melalui Panitia Verifikasi yang khusus dibentuk untuk itu.

## BAB VI
**Pasal 22**

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan Organisasi.

## BAB VII
**Pasal 23**

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

Nomor : VII/MUBES—III/LEMKARI/1986
Tentang
PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN PROGRAM UMUM LEMKARI

*Bismillahirrohmanirrohiem*

MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

**Menimbang** :

1. Bahwa Musyawarah Besar ke III LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, mempunyai tugas dan wewenang untuk merubah dan menyempurnakan Program Umum LEMKARI.
2. Bahwa Musyawarah Besar ke III LEMKARI memandang perlu untuk mengambil keputusan mengenai perubahan/penyempurnaan Program Umum LEMKARI agar dapat sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan dapat menyesuaikan dengan derap langkah pembangunan saat ini.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan penyusunan Program Umum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan LEMKARI sehingga dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran yang diinginkan.
4. Bahwa adanya perundang-undangan dan peraturan serta garis kebijakan organisasi agar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah serta sesuai dengan makna yang tersirat dalam perundang-undangan dan peraturan yang baru tersebut.



**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 mengenai keormasan.
2. Keputusan MUNAS GOLKAR III 1983 di Jakarta.
3. Keputusan MUBES III LEMKARI Nomor : II / MUBES—III / LEMKARI / 1986 tanggal 3 Mei 1986 tentang Peraturan Tata Tertib MUBES III LEMKARI.

**Memperhatikan** :

1. Pidato Pengarahan : Bapak Ketua Umum DPP GOLKAR
2. Pidato Pengarahan : Bapak MENKO KESRA R.I. pada Acara Pembukaan MUBES III LEMKARI tanggal 2 Mei 1986 di Jakarta.
3. Pidato Pengarahan : Bapak menteri Agama R.I.
4. Pidato Pengarahan : Bapak Ketua DPP MDI.
5. Laporan Pertanggung Jawaban DIRPUS LEMKARI Periode 1981 — 1986.
6. Pemandangan umum serta usul dan saran para peserta MUBES—III LEMKARI.

**Memutuskan** :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI TENTANG PERUBAHAN / PENYEMPURNAAN PROGRAM UMUM LEMKARI.

**Pertama** : Merubah/menyempurnakan Program Umum LEMKARI yang disyahkan dalam MUBES Ke II tahun 1981 di Jakarta.

**Kedua** : Perubahan/penyempurnaan Program Umum LEMKARI seperti dimaksud dalam diktum

pertama keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**Ketiga** : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan ditetapkan tersendiri dengan persetujuan Dewan Kurator LEMKARI.

**Keempat** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Mei 1986

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

1986
MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMKARI
PIMPINAN,
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

( Ir. Prasetyo Sunaryo ) ( Drs. Bambang Purnomo )





## LAMPIRAN
## KEPUTUSAN MUBES III LEMKARI 1986 DI JAKARTA
## NOMOR : VII/MUBES—III/LEMKARI/1986
## TANGGAL : 4 MEI 1986

# PROGRAM UMUM
# LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

## P E M B U K A A N

Bahwasannya tujuan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) adalah memberikan peningkatan kehidupan beragama dan berperan-serta dalam pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang 'adil dan makmur baik materiil maupun spirituil bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Bahwasannya LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM mempunyai sistim pendidikan kemasyarakatan untuk memenuhi hajat massa dalam pembangunan masyarakat.

Bahwasannya berhasilnya tujuan dan tugas pokok LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM pada akhirnya akan tergantung pada keikut-sertaan dan rasa tanggung jawab segenap umat Islam khususnya dan masyarakat umumnya.

Memenuhi panggilan :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة ال عمران ١٠٤

Artinya : *Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Surat Ali 'Imron ayat 104).*

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

سورة النحل : ١٢٥

Artinya : *Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang sangat mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. ( Surat An-Nahl ayat 125 ).*

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ . سورة الرعد : ١١

Artinya : *Sesungguhnya Alloh tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka berobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Surat Ar-Ro'd ayat 11).*

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورة الانفال : ٥٣

Artinya : *Yang demikian (siksaan) itu ialah karena sesungguhnya Alloh sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan sesungguhnya Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Surat Al-Anfal ayat 53).*

## BAB I
## PENDAHULUAN

### A. PENGERTIAN.

1. Program Umum LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM adalah program kerja LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM sebagai lembaga pendidikan dan kekaryaan dalam bidang ke-agamaan dan kemasyarakatan.
2. Penyusunan dan Penuangan Program Umum ini terdiri dari :
   - I. Sikap Dasar.
   - II. Sasaran.
   - III. Program Pokok.
3. Setiap 5 (lima) tahun program ini ditinjau kembali oleh Musyawarah Besar untuk disesuaikan dengan perkembangan pembangunan.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Program Umum LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM dimaksudkan untuk dapat memberikan arah bagi gerak dan kerja LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM sebagai kembaga pendidikan ke-agamaan dan kekaryaan pada 5 (lima) tahun mendatang dalam keikut-sertaan melaksanakan pembangunan meliputi segala bidang kehidupan masyarakat dalam program Nasional Bangsa Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan cita-cita Orde Baru dengan menitik beratkan pada usaha-usaha sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya gerak dalam turut serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat yang dinamis untuk mengemban kesinambungan pembangunan sebagaimana digariskan dalam GBHN tahun 1983 dan MUNAS–III Golongan Karya.
2. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Islam dengan bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W. yang diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila.
3. Meningkatkan kehidupan beragama yang ditujukan untuk ikut serta membina kerukunan antar ummat beragama dan meningkatkan peran-serta dalam membangun masyarakat maju yang 'adil, makmur, sejahtera yang diridhoi ALLAH S.W.T.

### C. AZAS DAN LANDASAN.

Program Umum ini disusun berazaskan Pancasila sebagai

satu-satunya azas LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) dengan berlandaskan :

1. Landasan Kenegaraan yaitu Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
2. Landasan Organisasi yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI.
3. Landasan Ke-Agamaan : AL QUR'AN dan SUNNAH RASULULLAH S.A.W.
4. Landasan Kekaryaan : 1) Keputusan MUBES II LEMKARI.
   2) Keputusan MUNAS III GOLKAR.

## D. RUANG LINGKUP.

Ruang Lingkup Program Umum ini meliputi :

1. Kegiatan yang menyangkut pembinaan kehidupan anggota LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
2. Kegiatan yang menyangkut peranan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM sebagai lembaga pendidikan keagamaan, dakwah dan kekaryaan dalam peran serta baik pada kegiatan-kegiatan Golongan Karya maupun kegiatan masyarakat Islam.

## BAB II
## SIKAP DASAR

Untuk mewujudkan tujuan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) dalam bidang Dakwah, Kekaryaan dan Pendidikan, LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) selalu berpegang pada sikap dasar Organisasi.

Sikap dasar ini merupakan prinsip-prinsip pokok yang merupakan pegangan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) dalam setiap gerak dan perjuangannya.

Sikap dasar tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memelihara kehidupan ummat beragama selaras dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila



(EKA PRASETIA PANCAKARSA).

Meningkatkan dan memelihara hubungan baik antara sesama ummat manusia atas dasar saling hormat menghormati keyakinan masing-masing, saling harga menghargai, sehingga dapat tercipta suasana kerukunan yang lebih baik.

Menjaga kesucian Agama dengan cara mempelajari, menghayati mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W. sehingga penyalahgunaan pengertian dan sasaran keagamaan dapat dicegah.

## BAB III
## S A S A R A N

### SASARAN UMUM.

1. Meningkatkan kesadaran hidup bernegara untuk mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila secara murni dan konsekwen.
2. Meningkatkan metode pengajaran dan penghayatan Agama Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga umat Islam. Indonesia dapat mengamalkan ajaran agamanya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menunjang usaha-usaha pembaharuan dan pembangunan.
3. Mensukseskan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV.
4. Pemenangan Pemilu 1987 dan pensuksesan Sidang Umum MPR 1988.

### SASARAN KHUSUS.

1. Meningkatkan mutu pelaksanaan dakwah Islamiah dalam arti luas dan tanggap.
2. Meningkatkan peranan dan kemampuan para Muballigh dan Da'i, sehingga lebih mampu berkomunikasi, berpartisipasi dan mampu membimbing warga khususnya dan umat Islam umumnya dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pemantapan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) sebagai Organisasi kemasyarakatan yang

berorientasi pada pendidikan dan kekaryaan.

4. Mengusahakan dengan sebaik-baiknya penyiaran dakwah yang mampu menumbuhkan Ukhuwah Islamiah dan persatuan bangsa.

## BAB IV
## POKOK -POKOK PROGRAM

### A. PROGRAM ORGANISASI !

1. *Konsolidasi Organisasi.*
   a. Memantapkan keanggotaan LEMKARI.
   b. Pembenahan administrasi keanggotaan yang dipusatkan di Senat LEMKARI.
   c. Melaksanakan penataan Struktur Organisasi LEMKARI disemua tingkatan sesuai dengan AD dan ART LEMKARI serta Persatuan Organosisasi.
   d. Memantapkan pembagian tugas dan meningkatkan kemampuan administrasi dalam Organisasi.
2. *Pendidikan dan Pembinaan.*
   a. Mengadakan pendidikan kader Muballigh dan Da'i.
   b. Pada dasarnya setiap anggota LEMKARI, adalah kader Pancasila dan kader Pembangunan.
   c. Mencetak kader Da'i yang berbobot dibidang ilmu dan penghayatan Agamanya sekaligus setia pada Pancasila dan UUD 1945, mandiri serta memiliki integritas dan kemampuan ber Organisasi.
   e. Membina dan meningkatkan kader Muballigh dan Da'i secara sistimatik dan berencana.
3. *Penerangan dan Penerbitan.*
   a. Memberikan penerangan mengenai program dan kegiatan LEMKARI.
   b. Mengusahakan buletin dan media lainnya untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan anggota di bidang organisasi, administrasi, kepemimpinan dan sebagainya.
   c. Memanfaatkan media penerangan lainnya.
   d. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kesetia kawanan dan ukhuwah Islamiyah sesama anggota.



4. *Organisasi Kemasyarakatan.*
   a. Menjalin hubungan dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya berdasarkan AD dan ART serta Peraturan Organisasi LEMKARI.
   b. Menyalurkan kepentingan masyarakat dalam bidang pembangunan menurut ruang lingkup karya dan kekaryaan organisasi berdasarkan kemampuannya masing-masing.

### B. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH.

1. *Pendidikan Agama.*
   a. Memberikan pelajaran Agama Islam yang bersumber dari kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Rasul kepada segenap lapisan masyarakat tanpa memandang umur, tingkatan, kedudukan, dan kesukuan dalam usaha mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Meningkatkan pendidikan agama di Pondok-pondok Pesantren sebagai upaya melayani kebutuhan ummat Islam.
   c. Meningkatkan mutu para Muballigh dan Da'i agar mampu mentrapkan ajaran Agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
   d. Mengusahakan sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan, seperti tempat-tempat ibadah, kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Rasul serta sarana lainnya.
   e. Mengadakan pembinaan generasi muda melalui kegiatan keagamaan agar kreativitas dan aktivitas pemuda dapat diarahkan kepada hal-hal yang berguna bagi pembangunan Negara, Bangsa dan Agama.
   f. Mengadakan pembinaan keagamaan kepada kaum wanita agar dapat mengembangkan peranannya dalam pembangunan selaras dengan tanggung jawab dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera.

2. *Umum / Ketrampilan.*
   a. Memberikan kesempatan kepada setiap anggota LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) untuk meningkatkan dirinya melalui pendidikan dan latihan-latihan, terutama dalam peran-serta menanggulangi anggota yang putus sekolah tapi belum bekerja.
   b. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang berdaya-guna dan berhasil-guna terutama kepada generasi muda sehingga kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggung jawab, antara lain melalui kegiatan-kegiatan olah raga, perkemahan dan sebagainya.
   c. Mengusahakan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) bagi para anggota/siswa LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM.

3. *Pengembangan Dakwah Amaliyah/Kemasyarakatan.*
   a. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup ummat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas dasar saling hormat menghormati dan harga menghargai keyakinan masing-masing dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kerjasama guna melanjutkan pembangunan Nasional.
   b. Ikut mengusahakan terciptanya keamanan lingkungan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pembangunan Nasional.
   c. Menanamkan kesadaran hidup berwawasan lingkungan yang sehat bagi kepentingan hidup manusia dan lingkungannya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa.

## C. PEMENANGAN PEMILU 1987, PENSUKSESAN SIDANG UMUM MPR 1988 DAN HASIL—HASILNYA.

1. Untuk terpeliharanya stabilitas yang dinamis serta kesinambungan kepemimpinan Nasional di tangan Orde Baru.
2. Untuk kesinambungan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Untuk Pengamanan, Pengamalan dan Pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, LEMKARI turut mensukseskan Sidang Umum MPR 1988 dan hasil-hasilnya.



## D. PENSUKSESAN PANCA KRIDA KABINET PEMBANGUNAN IV..

Panca Krida Kabinet Pembangunan IV sebagai Program Nasional selama Pelita IV merupakan pelaksanaan tugas Nasional untuk melanjutkan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) sebagai lembaga pendidikan dan kekaryaaan dalam pendidikan keagamaan dan dakwah turut bertanggung jawab dan berperan-serta dalam memelihara momentum pembangunan sesuai dengan sifat-fungsi dan kemampuannya berusaha meningkatkan pemasyarakatan Idiologi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan Nasional.

## E. PENCIPTAAN KERANGKA LANDASAN YANG KOKOH BAGI PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL.

Dalam usaha menciptakan kerangka landasan agar dapat tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri, dalam Pelita VI nanti benar-benar dapat tinggal-landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) sesuai dengan sifat, fungsi, peranan dan tanggung jawabnya menetapkan program-program antara lain. :

1. Turut meningkatkan penghayatan dan pengamalan Agama dalam rangka mempertinggi dan memperkuat moral dan budi pekerti yang luhur.
2. Meningkatkan peran Agama sebagai motivasi penggerak ummat beragama dalam pembangunan.
3. Turut menanggulangi dampak negatif dari proses mordenisasi yang berbentuk kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama dan Moral Pancasila.

## BAB V
## PENUTUP

Suksesnya pelaksanaan Program Umum LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini pada akhirnya akan sangat tergantung kepada partisipasi pimpinan dan anggota LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM dan Keluarga Besar GOLONGAN KARYA dalam mengabdikan dirinya untuk membangun masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho-Nya beserta taufik dan hidayah-Nya. Amin !.

***





## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

Nomor : VIII/MUBES—III/LEMKARI/1986.
TENTANG
POKOK—POKOK PIKIRAN LEMKARI TENTANG DAKWAH DALAM PEMBANGUNAN

*Bismillahirrohmanirrohiem*

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

**Menimbang :**

1. Bahwa Musyawarag Besar ke III LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi perlu mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi.
2. Bahwa kegiatan-kegiatan LEMKARI perlu diarahkan dibina dan dikembangkan agar mampu mengikuti derap langkah pembangunan yang semakin meningkat.
3. Bahwa demi untuk tercapainya cita-cita pembangunan yaitu masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera lahir dan bathin, LEMKARI khususnya, ummat Islam pada umumnya perlu lebih meningkat kesadarannya akan perlunya partisipasi mereka dalam pembangunan bangsa sesuai dengan bidang profesinya yaitu pendidikan agama dan dakwah, serta sosial kemasyarakatan.
4. Bahwa untuk maksus-maksud tersebut perlu digariskan pokok-pokok pikiran LEMKARI sebagai suatu pernyataan dan pandangan resmi

LEMKARI terhadap pelaksanaan pembangunan bangsa kita saat ini.

5. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan MUBES III LEMKARI yang mengesyahkan hal tersebut diatas.

**Mengingat** : 1. Anggaran Dasar LEMKARI dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI.
2. Program Umum LEMKARI 1986.

**Memperhatikan** :
1. Pidato Pengarahan Bapak Ketua Umum DPP GOLKAR.
2. Pidato Pengarahan Bapak Menteri Agama.
3. Usul dan saran dalam MUBES III LEMKARI 1986.

**Memutuskan** :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MUBES III LEMKARI 1986 tentang: POKOK-POKOK PIKIRAN LEMKARI TENTANG DAKWAH DALAM PEMBANGUNAN.

**PERTAMA** : Mengesyahkan yang tersebut diatas sebagai suatu Pokok-pokok pikiran LEMKARI yang resmi hasil MUBES III LEMKARI 1986.

**KEDUA** : Apabila kelak terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Mei 1986.

MUSYAWARAH BESAR KE III
MUBES III LEMKARI
PIMPINAN,
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

( Ir. Prasetyo Sunaryo ) ( Drs. Bambang Purnomo )



# POKOK-POKOK PIKIRAN DAKWAH LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( LEMKARI )

## I. PENDAHULUAN.

Bahwa persatuan dan kesatuan Nasional adalah merupakan semangat para perintis kemerdekaan yang harus diwarisi oleh generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan, yaitu berupa kegiatan perjuangan pembangunan bangsa menuju tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan kesepakatan Nasional yang telah dirumuskan oleh tokoh-tokoh Bangsa Indonesia termasuk di dalamnya tokoh-tokoh alim ulama, oleh karenanya wajib bagi setiap warga negara untuk menetapi Kesepakatan Nasional tersebut dengan menghayati, mentaati, mengamankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Islam sebagai agama luhur telah berperan untuk memberi motivasi dalam pembangunan dan pembinaan akhlak bangsa, sebagai manifestasi ibadah kepada Allah SWT dan realisasi perwujudan kehidupan bermasyarakat secara harmonis, tertib dan damai.

Bahwa Golongan Karya adalah merupakan kelompok sosial yang bangkit terpanggil dalam era Orde Baru untuk tampil mengamankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta dalam perkembangannya telah membuktikan mampu mengatasi pembangunan dengan program-program kekaryaan bagi seluruh lapisan masyarakat dan telah memantapkan posisinya sebagai kekuatan sosial yang mampu menciptakan stabilitas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa Lemkari sebagai lembaga dakwah/pendidikan kemasyarakatan, turut bertanggung jawab terhadap kelanjutan/kesinambungan serta peningkatan kualitas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Bangsa Indonesia melalui program-program dakwah pembangunan dan pendidikan-kemasyarakatan demi membentuk insan-insan Pancasila yang

berakhlak mulia, berbudi luhur, dan memiliki semangat kekaryaan, sebagai citra ideal manusia Indonesia seutuhnya yang berperan aktif untuk mewujudkan cita-cita Bangsa.

## II. PENGERTIAN.

1. Dakwah dalam arti luas merupakan suatu usaha perbaikan kehidupan umat manusia yang memiliki motivasi amar makruf nahi munkar yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, karena itu maka dakwah harus lebih merupakan suatu kekuatan moral yang mampu menggerakkan perbaikan kehidupan pendakwah sendiri dan dorongan isi dakwahnya.
2. Amar makruf sebagai ajakan berbuat kebaikan kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang kurang selaras, sehingga maksud amar makruf tersebut menjadi salah dimengerti atau ada kekeliruan interpretasi, keadaan ini banyak akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam konteks kemasyarakatan. Dalam pembentukan keseimbangan pemikiran yang baru, harus dapat diusahakan agar letak keseimbangannya lebih banyak memihak kepada pihak yang banyak dapat menyerap pemikiran amar makruf.

   Dalam membentuk keseimbangan pemikiran yang baru, nantinya masyarakat lebih banyak dapat menyerap pemikiran amar makruf upaya di atas merupakan usaha pelembagaan amar makruf dari keseluruhan *proses sebab dan akibat amar makruf* dan ini merupakan *problematika dakwah-dakwah.*
3. Dalam problematika dakwah akan terjadi pertemuan dua kutuk yang berlainan, ialah kutub amar makruf nahi munkar dan kutub kegemaran/kelaziman yang terdapat dalam masyarakat yang kurang selaras dengan makna amar makruf.

   Masalah akan timbul bilamana antara kedua kutub tadi terdapat problema yang kurang selaras dengan lainnya.
4. Dalam hal terjadi ketidak selarasan inilah dibutuhkan suatu pemecahan masalah yang mampu menyelaraskan dengan maksud amar makruf yang hendak kita tegakkan. Untuk mendapatkan pemecahan masalah yang demikian



ini dibutuhkan 3 (tiga) persyaratan yang harus mendukung, dalam garis besarnya adalah :

1. Obyektivitas pemecahan harus mempunyai argumentasi yang kuat.
2. Didukung oleh subyek-subyek dakwah yang berkarakterisan berprinsip.
3. Ada kemampuan menarik sasaran/publik dan dukungan legitimitas.

## III. PERSYARATAN YANG MENDUKUNG DAKWAH

*A. Obyektivitas pemecahan masalah harus mempunyai argumentasi yang kuat.*

1. Masyarakat sebagai obyek dakwah dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yang harus berbeda penerapan metode dakwahnya, karena mempunyai kondisi dan aspirasi yang berbeda, dua kelompok besar tersebut adalah kelompok yang sedang memerlukan pengetahuan/pendidikan keagamaan dan kelompok yang telah menghatati dan mengamalkan agama.

   Dalam peningkatan dakwah yang bersifat komprehensiv/ terpadu, masing-masing kelompok besar tersebut masih harus dibedakan lagi mengingat tingkat kondisi dan apresiasinya yang berbeda, sehingga perlu dikenal didaktik dan metodik yang tepat dan mengena sasaran dakwah.
2. Setiap masalah harus dipecahkan secara obyektip apa sebenarnya yang menjadi obyek dari masalah tersebut dan bagaimana pengaruh serta relevansinya dengan masalah lain.

   Setiap alternatif pemecahan yang dikemukakan harus mempunyai argumentasi yang kuat dalam garis amar makruf nahi munkar, yaitu ayat-ayat Al Qur'an dan Sunah Rasul serta kaidah/norma kemasyarakatan.
3. Terhadap argumentasi kaidah/norma kemasyarakatan harus diambil yang selaras dengan maksud dakwah sehingga dapat dihindarkan terjadinya dampak dan kontroversi yang mungkin terjadi. Dampak dan kontroversi dalam hal ini harus dapat distabilhikmah tanpa menimbulkan suatu

pandangan yang keliru, sebab kalau sampai terjadi, hal ini akan merusak citra dakwah dan akan menjauhkan dari ridlo Allah.

4. Al-Qur'an sebagai Al-Furqon, yakni pembeda yang jelas antara yang hak dan yang bathil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, harus menjadi pegangan argumentasi yang kuat dalam dakwah Islamiah.
5. Umat Islam dapat diberlakukan sebagai obyek dakwah dalam hal peningkatan kwalitas keimanannya, pengamalan ibadahnya, serta kondisi sosial ekonominya. Motivasi untuk peningkatan ini harus bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunah Rasul, serta sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Dalam peningkatan penghayatan beragama ini diusahakan agar seseorang tidak hanya menghayati secara formal dan individual, tetapi mampu merefleksikan dimensi moral yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

*B. Dukungan subyek-sybyek dakwah yang berkarakter dan berprinsip.*

1. Subyek-subyek dakwah adalah para da'i yang dapat diibaratkan sebagai motornya dakwah dan karena sebagai motor penggerak, maka harus merupakan suatu unit yang kompak, mempunyai mekanisme yang sinkron.
   Menurut Al-Qur'an dan Sunah Rasul pada dasarnya segenap kaum muslimin harus berlaku sebagai da'i ditempat dan bidangnya masing-masing, dengan demikian subyek-subyek dakwah pada hakekatnya adalah kaum muslimin yang merupakan penghayat dan pengamal Al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. Dalam rangka menunjang keberhasilan dakwah baik dalam kalangan umat Islam sendiri maupun dalam masyarakat luas, kaum muslimin harus banyak berperan secara aktif sebagai subyek dakwah yang mampu menentukan pola dan kebijaksanaan dakwahnya dengan motivasi Al-Qur'an dan Sunah Rasul, sebab dalam kondisi demikian umat



Islam yang perikehidupannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah Rasul dapat dibenarkan pembinaannya. Usaha pembinaan umat Islam menurut Al-Qur'an dan Sunah Rasul menunjang tunduk pada hukum positip/ hukum yang berlaku sah, dijamin kepastian hukumnya oleh UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Eka Prasetya Panca Karsa (P-4), serta besar jiwa ukhuwahnya. Subyek-subyek dakwah yang berkepribadian muslim akan dapat meletakkan dirinya dengan tepat pada prinsip-prinsip dakwah amar makruf nahi munkar, yang oleh Lemkari (Lembaga Karyawan Dakwah Islam) diletakkan dengan motto dakwahnya yang diambilkan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an surat Ali 'Imron ayat 104 dan surat An Nahl ayat 125.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة ال عمران ١٠٤

**Artinya :**
*"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ! merekalah orang-orang yang berbahagia"* *( Ali 'Imron 104 )*

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
سورة النحل : ١٢٥

**Artinya :**
*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik"* *( An Nahl 125 ).*

Subyek dakwah yang berkepribadian muslim dan Al-Qur'an dan Sunah Rasul akan mampu membentuk etika moral kemasyarakatan yang benar-benar etis dan mampu menstimulir pencegahan kemunkaran sebagaimana telah terjadi dalam sejarah perjuangan Nabi

Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya.

Pembangunan fisik/modernisasi masyarakat tanpa diikuti pengembangan etika moral yang membinanya akan melahirkan suatu keresahan dan dampak baru yang negatip yang apabila tidak didapatkan saluran pemecahannya akan merongrongi kepribadian dan moral bangsa, maka dalam menghadapi kepincangan/dampak demikian inilah peranan dakwah sangat dibutuhkan.

5. Penghimpunan subyek-subyek dakwah dalam suatu lembaga dakwah (seperti LEMKARI), sebagaimana terkandung dalam Al--Qur'an dan Sunah Rasul akan lebih memudahkan dan melancarkan pembentukan eksponen-eksponen dakwah berkepribadian muslim yang ideal, berdisiplin, tanggap serta memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar.

   Dalam lembaga dakwah tersebut maka usaha dakwah Islamiah lebih mampu memberikan contoh dan tauladan pengamalan dalam menegakkan yang makruf dan meniadakan yang munkar, sehingga memungkinkan membina dan membentuk etika moral yang tidak sekedar statis, tetapi benar-benar etis yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil, mana yang halal dan mana yang haram.

6. Peran dari lembaga dakwah kedalam adalah merupakan lembaga kontrol terhadap subyek-subyek dakwah agar bisa berperan aktif dengan memiliki pribadi muslim yang ideal dan berdisiplin didalam mengemban tugas keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan keluar merupakan lembaga sosialisasi etika moral yang hak di dalam membina moral dan kepribadian bangsa.

C. *Kemampuan menarik simpati masyarakat dan dukungan legitimitas*

1. Salah satu tujuan Pembangunan Nasional yang dicanangkan adalah untuk membangun Manusia Indonesia seutuhnya yang mampu memerankan dirinya secara serasi untuk memberikan hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik, materiil dan spirituil. Sejarah telah membuktikan



Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan kebudayaan fisik (materiil) dapat tumbuh secara cepat didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di lain pihak kebudayaan non fisik seperti agama, moral, norma, etik, undang-undang/peraturan-peraturan berkembang sedemikian lamban sehingga tidak dapat mengimbangi langkah-langkah perkembangan fisik dan hasil-hasil kemajuan ekonomi dan teknologi yang dicapai. Ketidak seimbangan perkembangan ini apabila tidak segera diatasi akan memperbesar jarak pemisah antara keduanya, yang berarti semakin banyak pula kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat yang dalam jangka panjang akan merugikan perkembangan masyarakat itu sendiri.

2. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan negatif yang tidak diinginkan akibat kesenjangan perkembangan hasil-hasil pembangunan fisik (materiil) dan perkembangan faktor-faktor budaya non fisik, maka membutuhkan adanya sistim kehidupan sosial yang pada hakekatnya mampu memberikan mekanisme keseimbangan dalam bentuk proses-proses pendidikan kemasyarakat dan pembinaan sumber daya manusia untuk mempersiapkan Indonesia, secara moral, mental, etik dan intelektual terampil menghadapi tuntutan-tuntutan pembangunan masa yang akan datang. Terciptanya sistem kehidupan sosial ini merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam partisipasi aktif masyarakat dalam lem-

baga-lembaga, institusi-institusi dan organisasi-organisasi sosial yang berpotensi dan mampu berperan nyata dalam proses pendidikan kemasyarakatan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan kesenjangan yang terjadi.

3. Perkembangan kegiatan dalam lembaga-lembaga, institusi-institusi dan organisasi-organisasi sosial untuk pendidikan kemasyarakatan di atas, secara ideal harus dapat berjalan secara seimbang dan serasi dengan tingkat mobilitas dan partisipasi masyarakat. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah adanya pembentukan pemikiran akibat kesenjangan tingkat penghayatan individu-individu yang terlibat dalam proses pendidikan kemasyarakatan ini, dalam kaitannya dengan mekanisme kelembagaan sosial yang ada.

***





## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

### Nomor : IX/MUBES-III/LEMKARI/1986
### TENTANG
### PARTISIPASI LEMKARI DALAM MENSUKSESKAN PEMILU 1987

*Bismillahirrohmanirrohiem*

**Menimbang** :

1. Bahwa Musyawarah Besar ke III LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, berwenang untuk menentukan garis-garis besar kebijaksanaan dan langkah-langkah organisasi.
2. Bahwa dalam rangka mensukseskan PEMILU 1987 sebagai perwujudan pembangunan politik bangsa dan negara Indonesia, perlu menentukan sikap dan garis kebijaksanaan organisasi.
3. Bahwa untuk itu perlu penegasan dan penjelasan mengenai garis-garis kebijaksanaan dan strategi perjuangan LEMKARI dalam rangka suksesnya PEMILU 1986 tersebut.

**Mengingat** :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI.
2. Program Umum LEMKARI.
3. Program Umum Golongan Karya.

**Memperhatikan** :

1. Pidato Pengarahan Bapak Ketua Umum DPP GOLKAR
2. Pidato Pengarahan Bapak Menteri Agama R.I. pada acara Pembukaan MUBES tanggal 2 Mei 1986 di Jakarta.

3. Pidato Pengarahan Bapak MENKO KESRA Republik Indonesia.
4. Pidato Pengarahan Bapak KETUA DPP MDI.
5. Pandangan Umum dalam MUBES III LEMKARI 1986.

**Memutuskan** : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI TENTANG PARTISIPASI LEMKARI DALAM MENSUKSESKAN PEMILU 1987 dalam GOLKAR.

**PERTAMA** : Menyerukan seluruh warga dan massa LEMKARI diseluruh Indonesia untuk berperan aktif mensukseskan PEMILU 1987 dalam Keluarga Besar Golongan Karya.

**KEDUA** : Menyerukan agar seluruh warga, secara terpadu giat dan tertib, menyatu dan berbaur dalam kegiatan Golongan Karya diseluruh tingkat dan diseluruh tanah air Indonesia demi tercapainya TRI SUKSES GOLKAR.

**KETIGA** : Mengikut sertakan seluruh mubaligh, juru dakwah LEMKARI untuk sekaligus menjadi juru kampanye dalam PEMILU 1987 bagi GOLKAR

**KEEMPAT** : Mengikut sertakan seluruh mubaligh, juru dakwah dan warga LEMKARI dalam penataran-penataran kader GOLKAR, penataran Juru Kampanye untuk peningkatan kemampuan dalam rangka mensukseskan dan memenangkan GOLKAR dalam PEMILU 1987.



**KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Mei 1986.

MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ( LEMKARI )

MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI
PIMPINAN,
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

( Ir. Prasetyo Sunaryo ) ( Drs. Bambang Purnomo )

## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III
## LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

Nomor : X/MUBES—III/LEMKARI/1986
TENTANG
PEMBENTUKAN FORMATUR PEMBENTUKKAN DEWAN KURATOR DAN DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI
MASA BAKTI 1986 — 1991

*Bismillahirrohmanirrohiem*

**Menimbang** :

1. Bahwa sudah saatnya dibentuk personalia baru Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI disebabkan berakhirnya masa bakti Dewan Kurator dan Direktorium Pusat yang lama (1981—1986).
2. Bahwa saat ini LEMKARI sudah sedemikian berkembang pesat ditengah masyarakat dan sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jajaran Orde Baru dalam melaksanakan kiprah Pembangunan Nasional membangun masyarakat sejahtera lahir dan bathin.
3. Bahwa oleh karena itu personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat yang akan datang perlu didukung dan terdiri dari personalia terbaik, penuh tanggung jawab dan berwibawa, terpercaya serta memiliki dedikasi dan kemampuan serta kepemimpinan yang diharapkan.
4. Bahwa sesuai dengan peraturan Tata Tertib MUBES III LEMKARI perlu ditetapkan Formulatur untuk memilih dan menyusun komposisi personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI periode 1986 — 1991.



**Mengingat** :

1. Anggaran Dasar LEMKARI Bab VI Pasal 13 Tentang Struktur Organisasi, Pasal 15, Bab VII Pasal 17 dan Bab VIII Pasal 18.
2. Keputusan MUBES III LEMKARI No. II/ MUBES—III/LEMKARI/1986 tentang Peraturan Tata Tertib MUBES III LEMKARI.

**Memperhatikan** :

1. Laporan pertanggung jawaban Dirpus LEMKARI (1981—1986) dalam Rapat Paripurna MUBES III LEMKARI 1986.
2. Usul dan saran-saran peserta MUBES III.

**Memutuskan** :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI TENTANG PEMBENTUKAN FORMATUR UNTUK MENYUSUN KOMPOSISI PERSONALIA DEWAN KURATOR DAN DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI MASA BAKTI 1986—1991.

**PERTAMA** : Membentuk susunan Formulatur tersebut sebagai berikut :

1. H. Sanusi Kurnaen Rasyidi, SH.
   ( unsur Dewan Kurator )
2. K. H. Noerali ( unsur DIRPUS )
3. Ir. MUHTADI. ( unsur Perwakilan TK I )

**KEDUA** : Memberikan tugas dan wewenang penuh kepada Formulator tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan ini untuk atas nama MUBES II LEMKARI memilih, menyusun dan menetapkan komposisi dan personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI masa bakti 1986 — 1991.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimaksud pada diktum kedua Surat Keputusan

ini harus selalu berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI serta segala pengarahan dan saran yang ada dan memperhatikan persyaratan personalia sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata'ala dan berakhlak baik serta berbudi luhur.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 45.
3. Mempunyai jiwa pengabdian dan pengorbanan yang tinggi terhadap keberhasilan tujuan dan cita-cita organisasi.
4. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.
5. Berkemampuan tinggi, penuh daya kreatif, berwibawa dan dapat dipercaya.
6. Dapat memberikan citra baru dan kesegaran serta kegairahan baru dalam organisasi.

**KEEMPAT** : Komposisi personalia hasil kerja Formatur disyahkan dengan Surat Keputusan MUBES III yang diadakan khusus untuk itu.

**KELIMA** : Tugas Formatur berakhir setelah terlantiknya Dewan Kurator dan Direktorium Pusat yang baru (1986—1991).



**KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mohon diindahkan oleh yang bersangkutan Dapat diadakan perubahan bila kelak dijumpai kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Mei 1986

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

MUSYAWARAH BESAR KE III
PIMPINAN,
LEMKARI
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

( Ir. Prasetyo Sunaryo ) ( Drs. Bambang Purnomo )

## KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

Nomor : XI/MUBES—III/LEMKARI/1986
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA DEWAN KURATOR
DAN DIREKTORIUM PUSAT
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
MASA BAKTI 1986 – 1991

*Bismillahirrohmanirrohiem*

**MUSYAWARAH KE III LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM**
**( L E M K A R I )**

**Menimbang** :
1. Bahwa Musyawarah Besar ke III LEMKARI adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang berwenang membentuk Pengurus Pusat LEMKARI masa bakti 1986 — 1991
2. Bahwa perlu adanya pergantian dan penyusunan kembali personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI yang telah selesai masa baktinya pada tahun 1986 ini, demi perkembangan dan kesinambungan kehidupan organisasi.

**Mengingat** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI khususnya mengenai hal kepengurusan Pusat LEMKARI : Bab VI pasal 13;15, Bab VII pasal 17 dan Bab VIII pasal 18.
2. Keputusan MUBES III LEMKARI Nomor : X/MUBES—III/LEMKARI/1986 tanggal 3 Mei 1986 tentang penunjukkan Formatur untuk membentuk Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI masa bakti 1986—1991.



**Memperhatikan** :
1. Permusyawarahan dalam MUBES III LEM KARI ini, termasuk usul dan pandangan peserta musyawarah dan usul perubahan dan penambahan Bidang-bidang yang ada untuk pembentukkan Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI masa bakti 1986-1991.

**Memutuskan** :
**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN MUBES III LEMKARI :

1. Mengesyahkan Susunan Kepengurusan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) masa bakti 1986-1991 yang disusun dan diusulkan oleh Formatur yang dibentuk dengan SK MUBES III Nomor : X/MUBES—III/LEMKARI/1986, terdiri dari nama-nama dan susunan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
2. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Mei 1986.
J a m : WIB.

MUSYAWARAH BESAR KE III LEMKARI
PIMPINAN,

MUSYAWARAH BESAR KE III
LEMKARI
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

( Ir. Prasetyo Sunaryo ) ( Drs. Bambang Purnomo )

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MUBES III LEMKARI 1986 DI JAKARTA
NOMOR : XI/MUBES--III/LEMKARI/1986
TANGGAL : 4 MEI 1986

## SUSUNAN PERSONALIA DEWAN KURATOR DAN DIREKTORIUM PUSAT LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) MASA BAKTI 1986 — 1991

### DEWAN KURATOR

1. H. Namiruddin SH.
2. RH. Eddy Masiadi
3. H. Soejadi Gitohardjo
4. H. Kurnain Rasyidi SH.
5. dr. H. Subarno

### DIREKTORIUM PUSAT

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ketua Umum | : | Drs. H.A. Suarno |
| 2. Ketua | : | Ir. Abdullah Syam MSc. |
| 3. Ketua | : | Ir. P. Sunaryo |
| 4. Ketua | : | H. M. Noer Ali |
| 5. Ketua | : | H. Dawud Sri Nurhidayat |
| 6. Sekretaris Jenderal | : | H. Sjamsuddin Zahar SE. |
| 7. Wakil Sekretaris Jenderal | : | Ir. H. Kemal Abusaifan |
| 8. Wakil Sekretaris Jenderal | : | Ir. H.A.H. Abdul Malik. |
| 9. Wakil Sekretaris Jenderal | : | Drs. H. Imam Supardi. |
| 10. Wakil Sekretaris Jenderal | : | Sunoto SH. |
| 11. Bendahara | : | H. Andi Nurdin |
| 12. Wakil Bendahara | : | Drs. Kais Ilyas |
| 13. Wakil Bendahara | : | Drs. Elmursil |
| 14. Wakil Bendahara | : | Sahlan Imam. |



### BIDANG- BIDANG.

*A. Pendidikan Agama dan Dakwah*
1. Drs. H. Ruwanto
2. Drs. Juarsa Brata Atmadja
3. K. Kasmudi Assiddiqi
4. H. Mudzakkir Ridwan
5. H. Zaenul Muttaqin
6. K.H.M. Thoyib.

*B. Bidang Pendidikan Umum dan Kemasyarakatan.*
1. Ir. H. Ermanto
2. Drs. H. Gozali
3. Drs. H. Tanusastramiharja
4. H.R. Sunaryo
5. H. Rustiono

*C. Bidang Organisasi dan Pengembangan*
1. Ir. Budirama
2. Drs. D. Sunaryo
3. Drs. H. Bambang Purnomo
4. Andi Aziz BA.
5. H. Andi Amir.

*D. Bidang Humas dan Penerangan.*
1. H. Hartono Riyadi
2. Herman Jaya
3. Ir. Muhtadi
4. Isrujito, Smhk.
5. Ir. Nugroho

*E. Bidang Kesejahteraan dan Perlengkapan.*
1. Ir. Nasija Warnadi
2. H. Nano, BE.
3. H. Abu Bakar Siddiq
4. H. Rasid Sudiarto

*F. Bidang Pembinaan Generasi Muda.*
1. Hartono Slamet
2. Sardi Syarif
3. Akmal
4. Bakti Irawan BA.

5. Ir. Kukuh
6. Jamhuri, BA.
7. Anto

*G. Bidang Peranan Wanita.*

1. Ny. Dra. H. Sri Tutini S.
2. Hajjah Nana Suyatna, SH.
3. Ny. Hajjah Lili Andi Azis, BA.

TEAM FORMATUR :

Ketua : H. Kurnaen Rasyidi, SH. .....

Anggota I : H. M. Noer Ali. .....

Anggota II : Ir. H. Muhtadi. .....

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Mei 1986

MUSYAWARAH BESAR KE III

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

MUSYAWARAH BESAR KE III
PIMPINAN
LEMKARI
( Lembaga Karyawan Dakwah Islam )
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 2 s/d 4 Mei 1986

Ketua, Sekretaris,

( Ir. Prasetyo Sunaryo ) ( Drs. Bambang Purnomo )



## PERWAKILAN " LEMKARI "
## YANG SUDAH TERBENTUK S/D MUBES III LEMKARI
## ( PERWAKILAN YANG IKUT MUBES III )

1. PERWAKILAN PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA ACEH
2. PERWAKILAN PROPINSI : SUMATERA UTARA
3. PERWAKILAN PROPINSI : SUMATERA BARAT
4. PERWAKILAN PROPINSI : RIAU
5. PERWAKILAN PROPINSI : JAMBI
6. PERWAKILAN PROPINSI : SUMATERA SELATAN
7. PERWAKILAN PROPINSI : BENGKULU
8. PERWAKILAN PROPINSI : LAMPUNG
9. PERWAKILAN PROPINSI : DKI JAKARTA RAYA
10. PERWAKILAN PROPINSI : JAWA BARAT
11. PERWAKILAN PROPINSI : D. I. YOGYAKARTA
12. PERWAKILAN PROPINSI : JAWA TIMUR
13. PERWAKILAN PROPINSI : BALI
14. PERWAKILAN PROPINSI : KALIMANTAN BARAT
15. PERWAKILAN PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN
16. PERWAKILAN PROPINSI : KALIMANTAN TIMUR
17. PERWAKILAN PROPINSI : SULAWESI UTARA
18. PERWAKILAN PROPINSI : SULAWESI SELATAN
19. PERWAKILAN PROPINSI : SULAWESI TENGGARA

DIRPUS LEMKARI